



**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN**



# **LAPORAN KINERJA**

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA  
PENGAMBENGAN  
TAHUN 2024**

---

## LEMBAR PENGESAHAN



# LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2024

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

Jembrana, 16 Januari 2025

**Disetujui oleh :**

**Disusun oleh :**

Penanggung Jawab,  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Pengambengan

Ketua Tim  
Kepala Sub Bagian Umum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Mannoengi', written over a thin horizontal line.

Andi Mannoengi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lukman Hadi', written in a cursive style.

Lukman Hadi



## KATA PENGANTAR



Mengacu pada RPJMN 2021 – 2024 dan RKT Tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2024 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (base line) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan Tahun 2024 namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di tahun 2024. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 ini disertai dengan Data Dukung Capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan pada Tahun 2024.

Jemberana, 16 Januari 2025

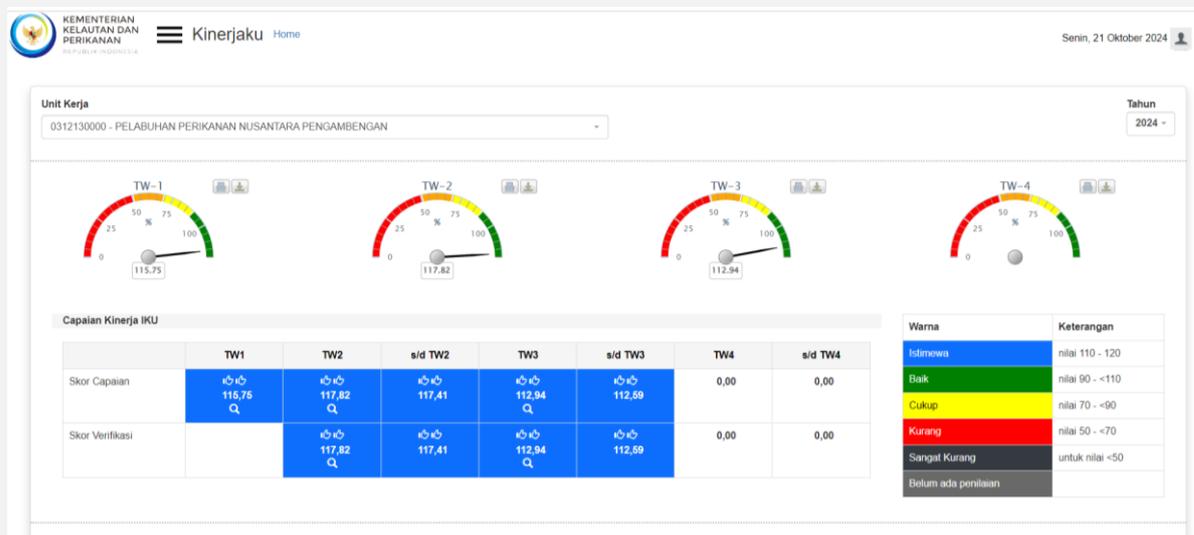
Kepala Pelabuhan



Andi Mannoengi, S.St.Pi, M.Pi

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp 16.443.659.000,- pada Tahun 2024, yang terealisasi sebesar Rp 15.709.597,130 atau 95,54 % dari total target penyerapan anggaran pada Tahun 2024. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **116,58%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaaku pada Gambar 1)

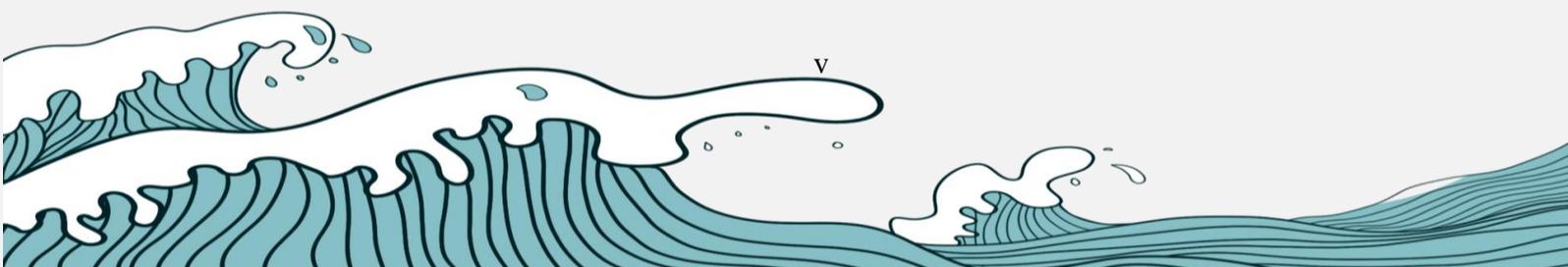


**Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024**

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan s/d Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.01.01 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)

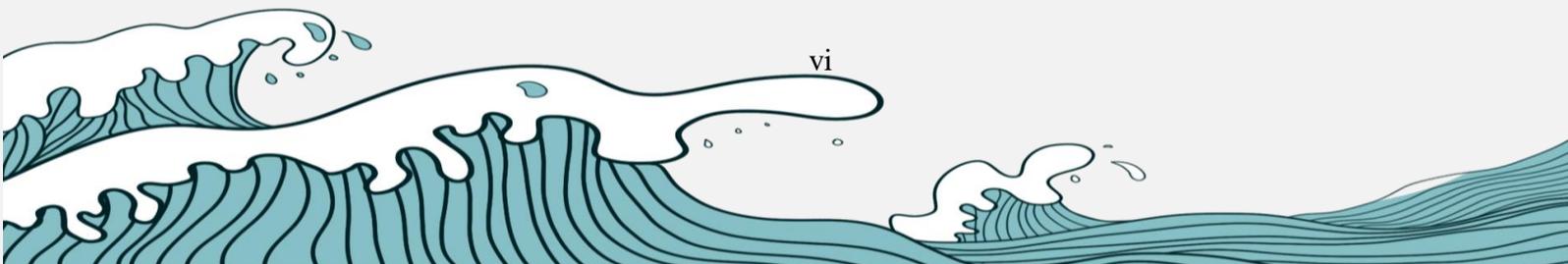
2. IKS.02.02 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
3. IKS.03.01 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
4. IKS.03.02 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
5. IKS.03.03 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
6. IKS.04.01 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
7. IKS.04.02 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
8. IKS.05.01 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IKS.06.01 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IKS.07.01 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
12. IKS.07.03 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
13. IKS.07.04 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)
14. IKS.07.05 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
15. IKS.07.06 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
16. IKS.07.07 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
17. IKS.07.08 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
18. IKS.07.09 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)



Sedangkan untuk indikator yang tidak memenuhi target pada Tahun 2024, antara lain :

11. IKS.07.02 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum .....	2
C. Tugas dan Fungsi .....	3
D. Struktur Organisasi .....	4
E. SDM Aparatur PPN Pengembangan.....	6
F. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Pembangunan Nasional Visi Presiden .....	11
B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Visi KKP .....	13
C. Pembangunan Perikanan Tangkap.....	15
D. Target Kinerja Triwulan II Tahun 2024 .....	23
E. Rencana Aksi Penetapan Kinerja .....	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
B. Akuntabilitas Keuangan .....	87
BAB IV. PENUTUP .....	87
A. Kesimpulan.....	91
B. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya .....	93
C. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	93

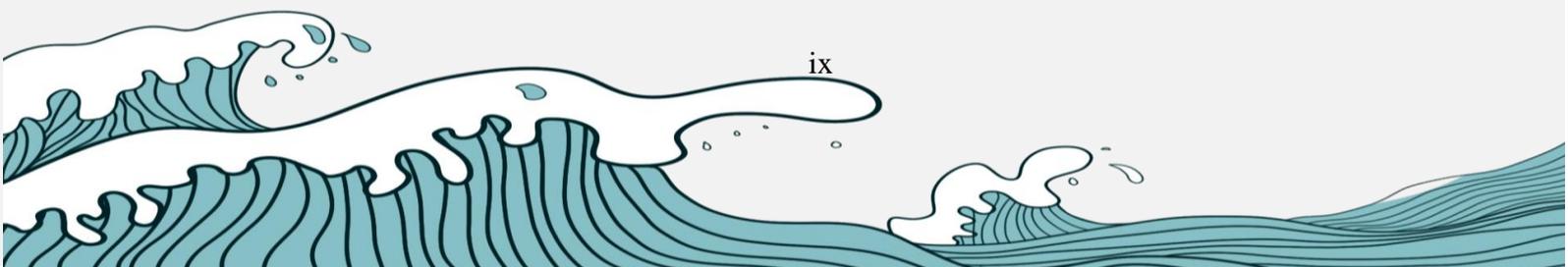


## DAFTAR TABEL

TABEL 1 Komposisi Pegawai Pelabuhan Berdasarkan Golongan .....	7
TABEL 2 Komposisi Pegawai Pelabuhan Berdasarkan Pendidikan.....	8
TABEL 3 Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Berdasarkan Jenis Kelamin ...	8
TABEL 4 Tabel Informasi Cascading .....	21
TABEL 5 Target Kinerja Pelabuhan.....	23
TABEL 6 Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran.....	24
TABEL 7 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 ...	27
TABEL 8 Rincian Capaian Indikator PNBPN.....	30
TABEL 9 Perbandingan dengan Satker Lain .....	31
TABEL 10 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	32
TABEL 11 Rincian Capaian Indikator Volume Produksi.....	33
TABEL 12 Perbandingan dengan Satker Lain .....	34
TABEL 13 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	35
TABEL 14 Rincian Capaian Indikator Permohonan Pengusahaan .....	37
TABEL 15 Perbandingan dengan Satker Lain .....	37
TABEL 16 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	38
TABEL 17 Rincian Capaian Indikator Tingkat Kinerja.....	39
TABEL 18 Perbandingan dengan Satker Lain .....	40
TABEL 19 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	41
TABEL 20 Rincian Capaian Indikator Pelayanan Kesyahbandaran .....	43
TABEL 21 Perbandingan dengan Satker Lain .....	44
TABEL 22 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	45
TABEL 23 Rincian Capaian Indikator Pengembangan Fasilitas.....	46
TABEL 24 Perbandingan dengan Satker Lain .....	47
TABEL 25 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	48
TABEL 26 Rincian Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan.....	49
TABEL 27 Perbandingan dengan Satker Lain .....	50
TABEL 28 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	51
TABEL 29 Rincian Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah .....	52
TABEL 30 Perbandingan dengan Satker Lain .....	53
TABEL 31 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	54
TABEL 32 Rincian Capaian Indikator Peningkatan Pengetahuan.....	56



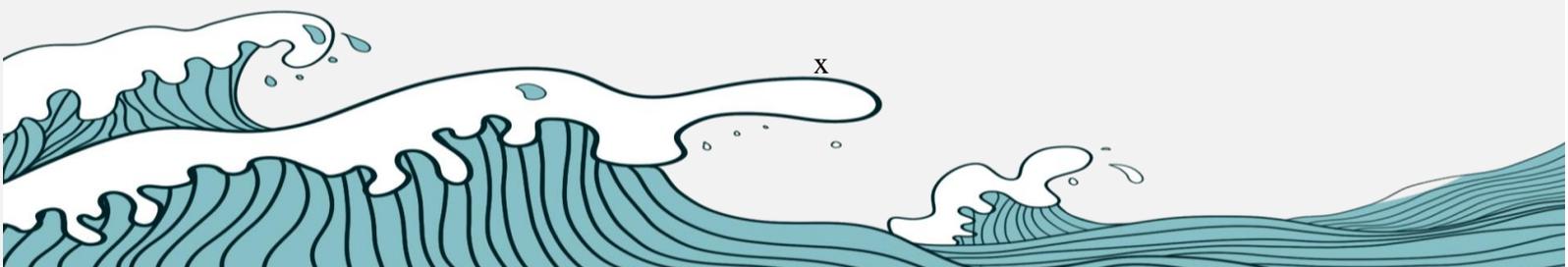
TABEL 33 Perbandingan dengan Satker Lain .....	57
TABEL 34 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	58
TABEL 35 Rincian Capaian Indikator Nilai WBK.....	61
TABEL 36 Perbandingan dengan Satker Lain .....	62
TABEL 37 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	63
TABEL 38 Rincian Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan..	64
TABEL 39 Perbandingan dengan Satker Lain .....	65
TABEL 40 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	65
TABEL 41 Rincian Capaian Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja.....	66
TABEL 42 Perbandingan dengan Satker Lain .....	67
TABEL 43 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	68
TABEL 44 Rincian Capaian Indikator IP ASN.....	69
TABEL 45 Perbandingan dengan Satker Lain .....	70
TABEL 46 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	70
TABEL 47 Rincian Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan PBJ .....	74
TABEL 48 Perbandingan dengan Satker Lain .....	74
TABEL 49 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	75
TABEL 50 Rincian Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan BMN .....	76
TABEL 51 Perbandingan dengan Satker Lain .....	77
TABEL 52 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	78
TABEL 53 Rincian Capaian Indikator Tingkat Kepatuhan IKPA.....	79
TABEL 54 Perbandingan dengan Satker Lain .....	80
TABEL 55 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	81
TABEL 56 Rincian Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran ....	82
TABEL 57 Perbandingan dengan Satker Lain .....	83
TABEL 58 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	83
TABEL 59 Rincian Capaian Indikator SKM.....	84
TABEL 60 Perbandingan dengan Satker Lain .....	85
TABEL 61 Realisasi anggaran mendukung IKU .....	86
TABEL 87 Pagu Anggaran .....	87
TABEL 88 Realisasi Keuangan .....	88





## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku .....	iv
GAMBAR 2 Struktur Organisasi Pelabuhan.....	6
GAMBAR 3 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku .....	91



## BAB I PENDAHULUAN

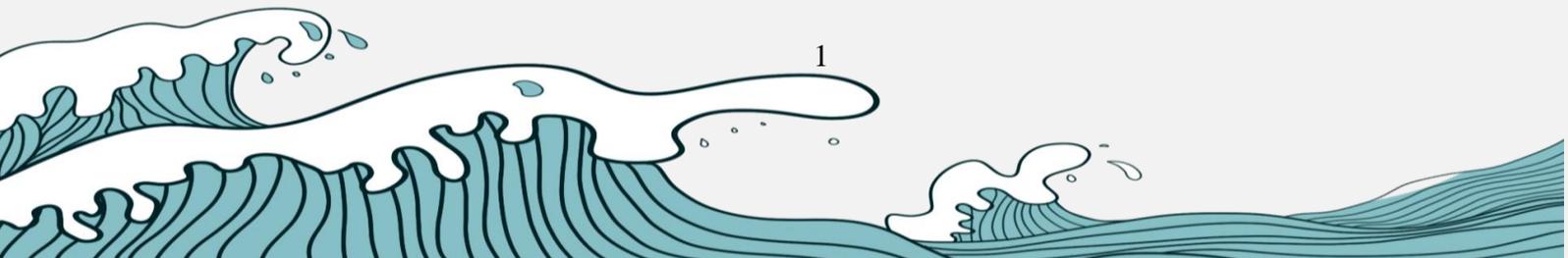
### A. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang sangat strategis dan berperan sebagai rumah atau basis utama dalam melaksanakan berbagai program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun tempat untuk mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku pada lingkup KKP yang didasari 3 pilar Misi **KKP yaitu Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability) dan Kesejahteraan (Prosperity)**. Oleh karena itu, di dalam kawasan Pelabuhan harus tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan secara baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggungjawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh



instansi pemerintah agar dilaporkan secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran,

keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang disusun setiap tahun. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang ; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

## B. Gambaran Umum

Pembangunan perikanan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Jembrana Provinsi Bali. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar



Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Selain itu Pelabuhan Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang kepala Pelabuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;



#### 14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanan; dan/atau keimigrasian.
2. Fungsi perusahaan yaitu fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

#### D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 66/PERMEN-KP/2020



Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
2. Tim Kerja Operasional Pelabuhan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Tim Kerja Kesyahbandaran, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.



5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan terdiri dari Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Pranata Komputer Muda, dan Pranata Keuangan APBN Penyelia.



**Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan**

### E. SDM Aparatur PPN Pengembangan

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan didukung oleh 71 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 35 orang, PPPK sebanyak 18 orang dan Pramubakti sebanyak 18 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang telah ditetapkan.

**Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024 Berdasarkan Golongan**

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Dukungan Manajerial	-	2	7	-	9
3.	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
4.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	6	-	6
5.	Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	-	2	4	-	6
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	5	-	5
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	Perencana (Muda)	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-	-	18
8.	Pegawai Pramubakti	-	-	-	-	18
Jumlah						71

**Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan**

No	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	DIII	S1/DIV	S2	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	2	6	-	8
3.	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	1	-	-	-	1
4.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	-	1	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	2	4	-	6
5.	Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	1	1	5	-	7
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	5	-	5
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	-	1	1
	Perencana (Muda)	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8	3	7	-	18
8.	Pegawai Pramubakti	13	1	4		18
Jumlah						71

**Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin**

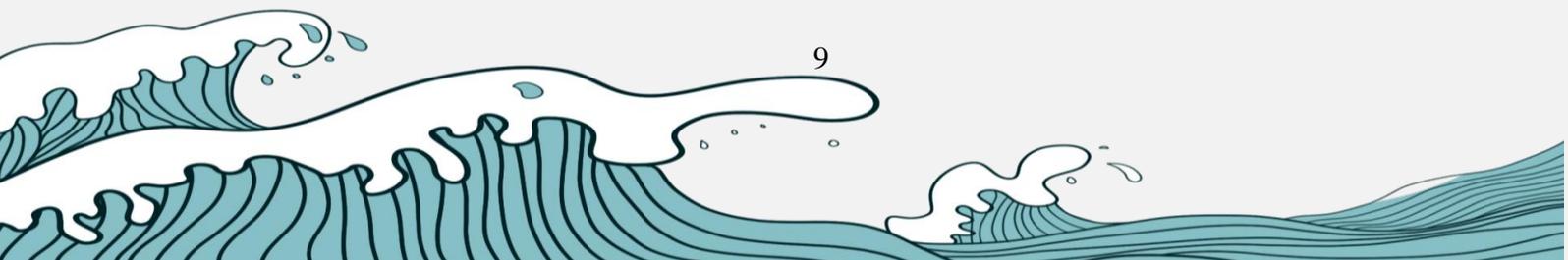
No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Pelabuhan	1	-	1
2.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Dukungan Manajerial	2	7	9

3.	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	1	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	1	-	1
4.	Tim Kerja Kerja Operasional Pelabuhan	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	4	2	6
5.	Tim Kerja Kerja Kesyahbandaran	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	6	1	7
6.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	2	3	5
	Pranata Komputer (Muda)	1	-	1
	Perencana (Muda)	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	1	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11	7	18
8.	Pegawai Pramubakti	11	7	18
Jumlah				71

## F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) s/d Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 sebagai berikut:



## **1. RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

## **2. BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini di sajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan.

## **3. BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 2024.

## **4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

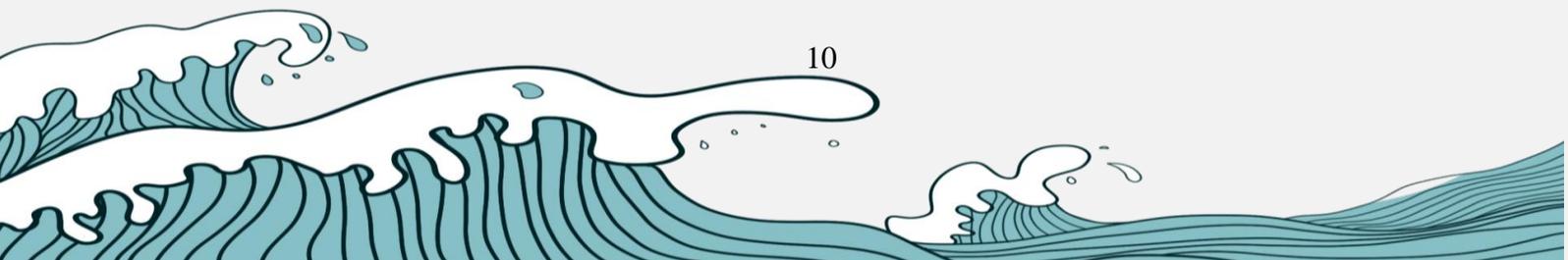
Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, Analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

## **5. BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## **6. LAMPIRAN**

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Pembangunan Nasional Visi Presiden

#### • Visi Presiden

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2021-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan dimana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

#### • Misi Presiden

Misi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

##### **Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

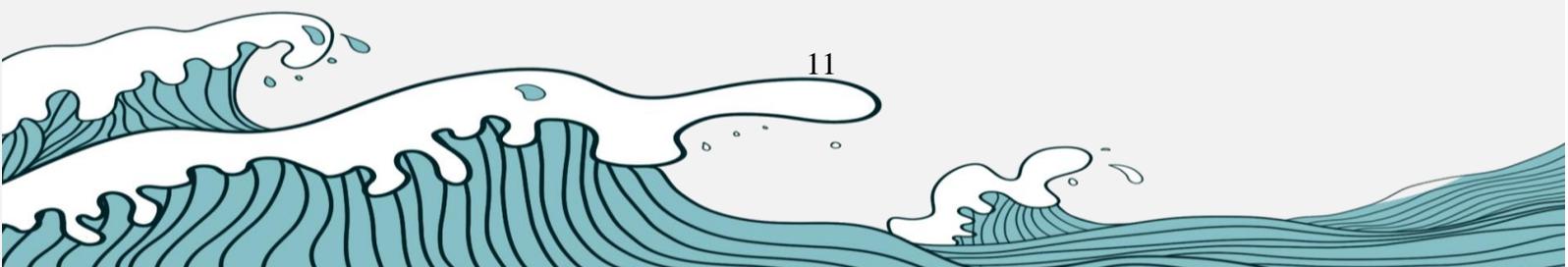
- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

##### **Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

##### **Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan



- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi
- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

#### **Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

#### **Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**

- Pembinaan Ideologi Pancasila
- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi

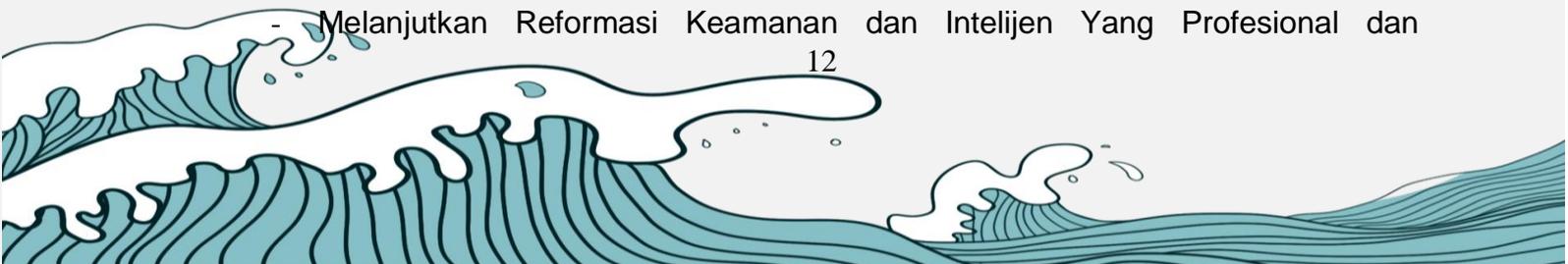
#### **Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**

- Melanjutkan Penataan Regulasi
- Melanjutkan Reformasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

#### **Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh**

##### **Warga**

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelijen Yang Profesional dan



Terpercaya

### **Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Reformasi Pelayanan Publik

### **Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan**

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergi
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

#### • **Tujuan Pembangunan Nasional**

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

### **B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Visi KKP 2021-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian, berlandaskan Gotong Royong”.

#### • **Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2021-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

#### **Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

- Peningkatan Daya Saing SDM KP

- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

## **Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

## **Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

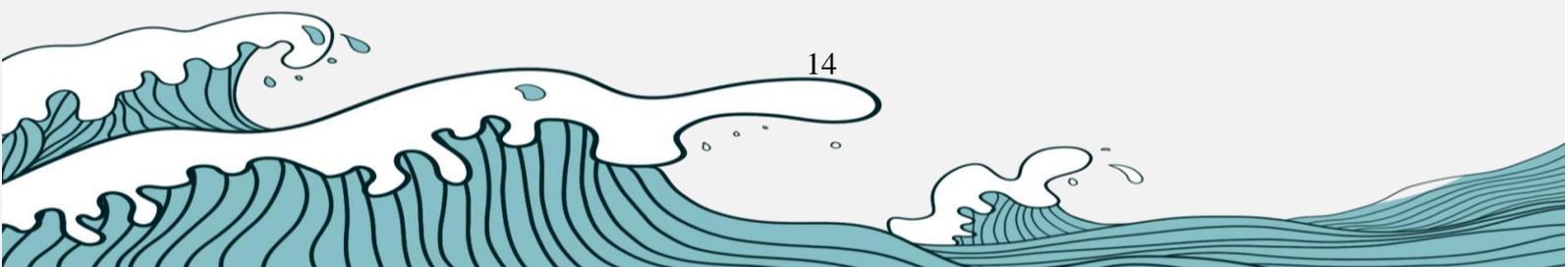
## **Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

### **• Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan**

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- 1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:**
  - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
  - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
- 2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:**
  - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
  - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
- 3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni:**
  - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati,
  - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
  - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP,yakni:**
  - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP



## C. Pembangunan Perikanan Tangkap

### • Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian berlandaskan Gotong- Royong”.

### • Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

#### **Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

#### **Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

#### **Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumberdaya Perikanan

#### **Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**

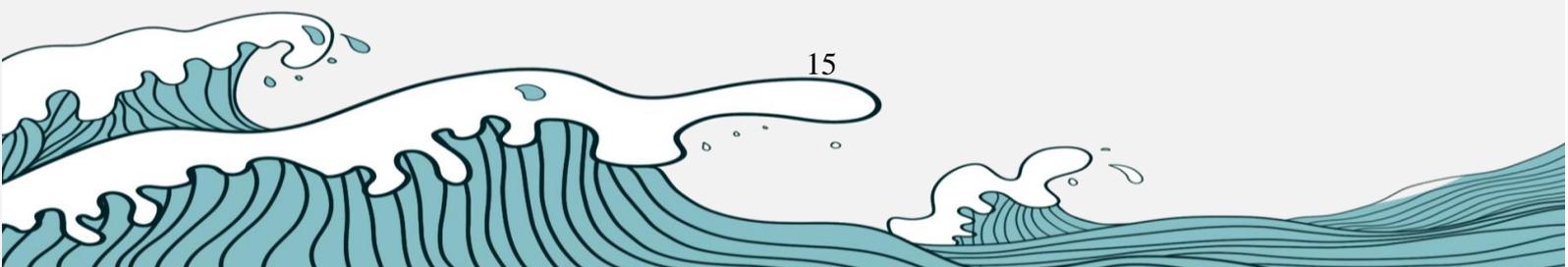
- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

### • Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

#### **1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**

yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.



## **2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.

## **3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan**

yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure

## **4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**

yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai berikut:

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina” artinya bahwa Wilayah PPN Pengembangan Jembrana merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Jembrana sepanjang garis pantai 76 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan di masa mendatang.
2. “Yang Berdaya Saing” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Pengembangan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang dipasarkan stabil. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan. Di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan adanya industri/perusahaan



yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat /nelayan /stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Pengembangan Jembrana
2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu dialokasikan pada PPN Pengembangan Jembrana
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus diusahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk menguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin maka ikan tersebut boleh dipasarkan.
4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Pengembangan Jembrana adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, per bulan maupun pertahunnya di Kota Jembrana
5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih higienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan di daerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari di harapkan



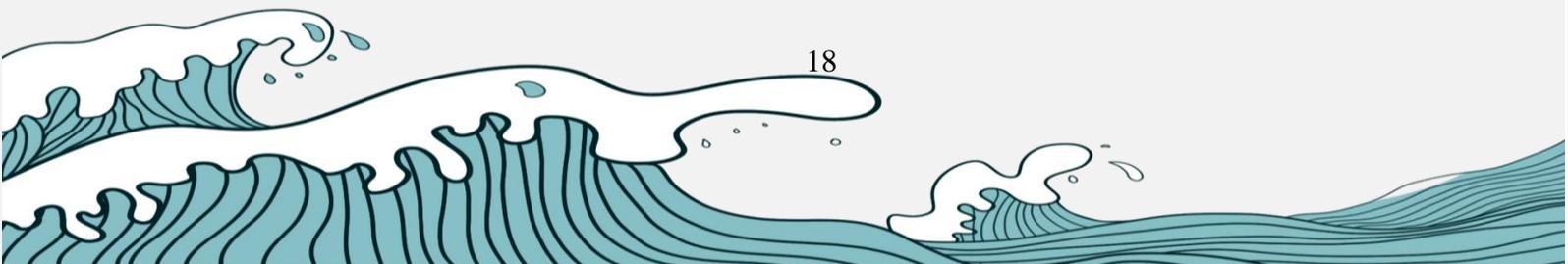
membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut

7. Meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat Kota Jembrana melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di kota Jembrana sendiri. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di area PPN Pengembangan Jembrana maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.
8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan control) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/Stakeholder yang ada di Kota Jembrana untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan Usahanya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

### **Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan**

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain:

1. *Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan*
  - a) Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)
    - Jumlah pemenuhan pelaporan PNBP di UPT PPN Pengembangan (dokumen).
2. *Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan*
  - a) Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
    - Validasi nilai perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (dokumen)



3. *Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing*

- a) Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
  - Jumlah permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (dokumen)
- b) Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
  - Nilai Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Evkin (Aplikasi)
- c) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
  - Jumlah pelayanan kesyahbandaran yang diterbitkan PPN Pengembangan (dokumen)

4. *Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal*

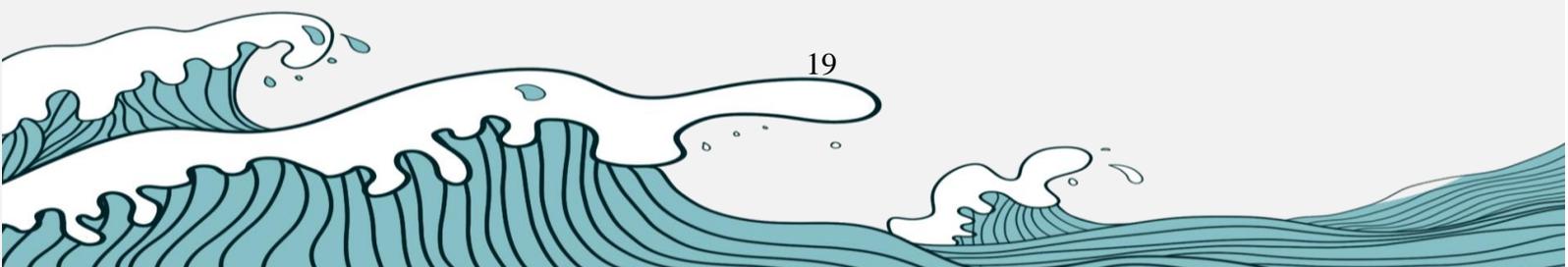
- a) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
  - Penjumlahan pengembangan fasilitas di PPN Pengembangan
- b) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
  - Nilai pengendalian lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Selaraskan (Aplikasi)

5. *Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan*

- a) Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
  - Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh PPN Pengembangan

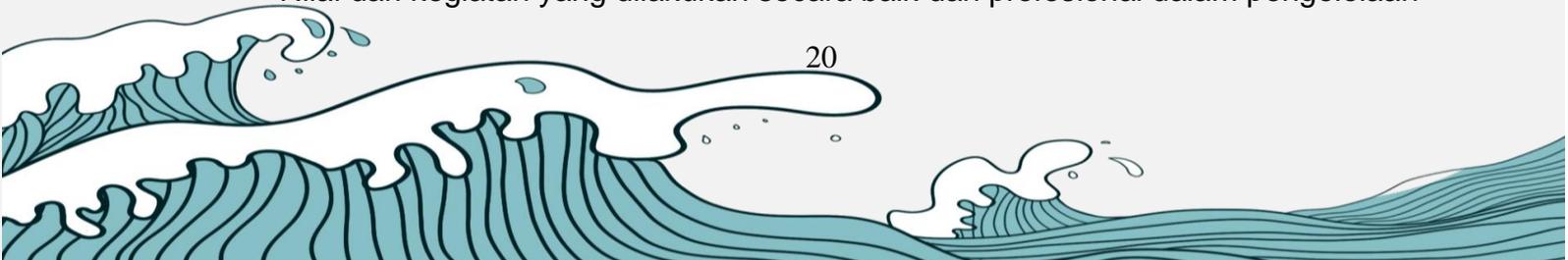
6. *Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan*

- a) Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
  - Data nelayan/awak kapal perikanan yang telah menerima pelatihan sertifikasi awak kapal (Dokumen)



## 7. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

- a) Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
- Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Manajemen Perubahan
  - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Tata Laksana
  - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Sistem Manajemen SDM
  - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Akuntabilitas
  - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Pengawasan
  - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Komponen Hasil
- b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pengembangan (Persen)
- Nilai persentase atas penyelesaian laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK PPN Pengembangan
- c) Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)
- Nilai Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja dari Unit Kerja.
- d) IP ASN PPN Pengembangan (indeks)
- IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
- e) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPN Pengembangan (Persen)
- Nilai dari beberapa unsur berikut :
    - Rencana umum pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
    - Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
    - Laporan penyelenggaraan Barang/Jasa Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)
- f) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengembangan (Persen)
- Nilai dari kegiatan yang dilakukan secara baik dan profesional dalam pengelolaan



semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

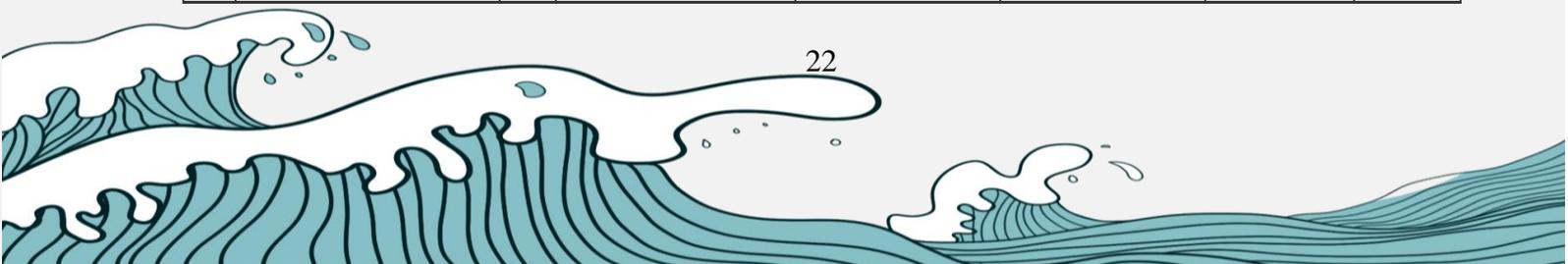
- g) Nilai IKPA PPN Pengembangan (Nilai)
  - Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
- h) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Pengembangan (Nilai)
  - Realisasi perencanaan anggaran UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (%)
- i) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
  - Nilai survey dari masyarakat melalui Si Susun KKP (Aplikasi)

Informasi *cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. Tabel Informasi Cascading / Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II)**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Frekuensi	Perhitungan	Satuan	Target
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Pengembangan	1 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Juta	760,971
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Ton	14479
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	100
		4 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Rata-rata	Nilai	84
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	84
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	10,31

			Nusantara Pengembangan (Persen)				
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kapal	1043
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	25
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	45,10
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Persen	80
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Indeks	94
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	80



		Nusantara Pengembangan (Persen)				
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Nilai	93,76
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	71
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Indeks	88,30

#### D. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan indikator kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang di-*cascading* dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai berikut :

**Tabel 5. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Pengembangan	1   Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	760,971
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2   Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	14479
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing	3   Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	100
		4   Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	84
		5   Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	84
4		6   Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	10,31

	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal	7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	30,1
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan	8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1043
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	25
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	45,10
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	71
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	88,30

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan untuk Tahun 2024 dapat di komposisikan pada tabel di bawah ini

**Tabel 6. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024**

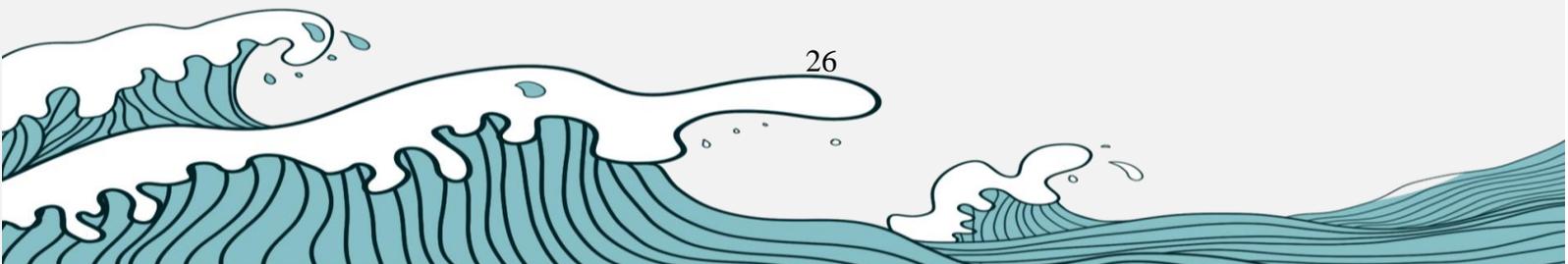
KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TAHUN 2024		REALISASI TAHUN 2024		
			TARGET	% PAGU	REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.517.716.000	3.517.716.000	100%	3.223.798.968	91,64%	91,64%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	38.000.000	38.000.000	100%	35.335.653	92,99%	92,99%
2337.ACA	Perizinan Produk[Base Line]	24.900.000	24.900.000	100%	24.875.653	99,90%	99,90%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	24.900.000	24.900.000	100%	24.875.653	99,90%	99,90%

2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	13.100.000	13.100.000	100%	10.460.000	79,85%	79,85%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.100.000	13.100.000	100%	10.460.000	79,85%	79,85%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.388.402.000	3.388.402.000	100%	3.155.540.879	93,13%	93,13%
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	150.000.000	150.000.000	100%	143.185.012	95,46%	95,46%
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	150.000.000	150.000.000	100%	143.185.012	95,46%	95,46%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	1.750.402.000	1.750.402.000	100%	1.587.441.342	90,69%	90,69%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.750.402.000	1.750.402.000	100%	1.587.441.342	90,69%	90,69%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	75.000.000	75.000.000	100%	74.998.920	100,00%	100,00%
2338.RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	75.000.000	75.000.000	100%	74.998.920	100,00%	100,00%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.413.000.000	1.413.000.000	100%	1.349.915.605	95,54%	95,54%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	995.827.026	99,58%	99,58%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	413.000.000	413.000.000	100%	354.088.579	85,74%	85,74%
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	8.000.000	100%	7.854.500	98,18%	98,18%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	8.000.000	8.000.000	100%	7.854.500	98,18%	98,18%
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	8.000.000	100%	7.854.500	98,18%	98,18%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	83.314.000	83.314.000	100%	25.067.936	30,09%	30,09%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	83.314.000	83.314.000	100%	25.067.936	30,09%	30,09%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	83.314.000	83.314.000	100%	25.067.936	30,09%	30,09%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.925.943.000	12.925.943.000	100%	12.486.266.262	96,60%	96,60%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.925.943.000	12.925.943.000	100%	12.486.266.262	96,60%	96,60%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	255.108.000	255.108.000	100%	254.900.000	99,92%	99,92%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	255.108.000	255.108.000	100%	254.900.000	99,92%	99,92%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	12.105.440.000	12.105.440.000	100%	11.728.428.237	96,89%	96,89%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	38.273.000	38.273.000	100%	29.422.690	76,88%	76,88%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	13.727.000	13.727.000	100%	6.602.299	48,10%	48,10%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.053.440.000	12.053.440.000	100%	11.692.403.248	97,00%	97,00%

2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	271.255.000	271.255.000	100%	268.375.660	98,94%	98,94%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	271.255.000	271.255.000	100%	268.375.660	98,94%	98,94%
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	55.000.000	55.000.000	100%	40.831.581	74,24%	74,24%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	55.000.000	55.000.000	100%	40.831.581	74,24%	74,24%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	239.140.000	239.140.000	100%	193.730.784	81,01%	81,01%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	68.280.000	68.280.000	100%	61.587.381	90,20%	90,20%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	32.492.000	32.492.000	100%	29.049.883	89,41%	89,41%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	138.368.000	138.368.000	100%	103.093.520	74,51%	74,51%

## E. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU ***Perspektif Internal Process dan Learning and Growth*** yang disandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga di dapat persentase pencapaian secara berkala.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2019 telah melaksanakan penilaian indikator kinerja utama sebanyak 13 (Tiga belas) dengan mengacu pada *Balanced Scorecard* (BSC). Pada tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan rincian 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Tambahan. Dari perhitungan angka realisasi terhadap indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) menurut *Balanced Scorecard* (BSC) sebesar **116,58%** dengan rincian pada Table berikut.

**Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024**

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target s/d DESEMBER	Capaian s/d DESEMBER	%
<b>S.01</b>	<b>Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan</b>						<b>120</b>	
IKS.1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	Juta	Maximize	Nilai Posisi Akhir	760,97	760,97	1.166,84	120
<b>S.02</b>	<b>Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan Meningkat</b>						<b>120</b>	
IKS.02.1	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	14.479,00	14.479,00	23.493,00	120
<b>S.03</b>	<b>Pengelolaan PPN Pengembangan yang Berdaya Saing</b>						<b>113,26</b>	
IKS.03.1	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	100	100	100
IKS.03.2	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	84	168	195,2	116,19
IKS.03.3	Tingkat Kesyahbandaran Pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	84	100	119,05
<b>S.04</b>	<b>Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pengembangan yang Optimal</b>						<b>113,65</b>	
IKS.04.1	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10,31	10,31	11,28	109,41
IKS.04.2	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	30,1	60,2	184,85	120
<b>S.05</b>	<b>Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pengembangan</b>						<b>120</b>	
IKS.05.1	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1.043,00	1.043,00	1.430,00	120
<b>S.06</b>	<b>Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan</b>						<b>120</b>	
IKS.06.1	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	25	25	74,4	120
<b>S.07</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan</b>						<b>109,16</b>	
IKS.07.1	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	45,1	45,1	55,24	120

IKS.07.2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	66,67	83,34
IKS.07.3	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	94	98,88	105,19
IKS.07.4	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	84	93,53	111,35
IKS.07.5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	96,29	120
IKS.07.6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	90	112,5
IKS.07.7	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	93,76	96,66	103,09
IKS.07.8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71	71	90	120
IKS.07.9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,3	88,3	89,76	101,65

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 diukur melalui 18 indikator kinerja. Adapun pembahasan masing-masing indikator kinerja utama (IKU) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

## **Sasaran Strategis 1**

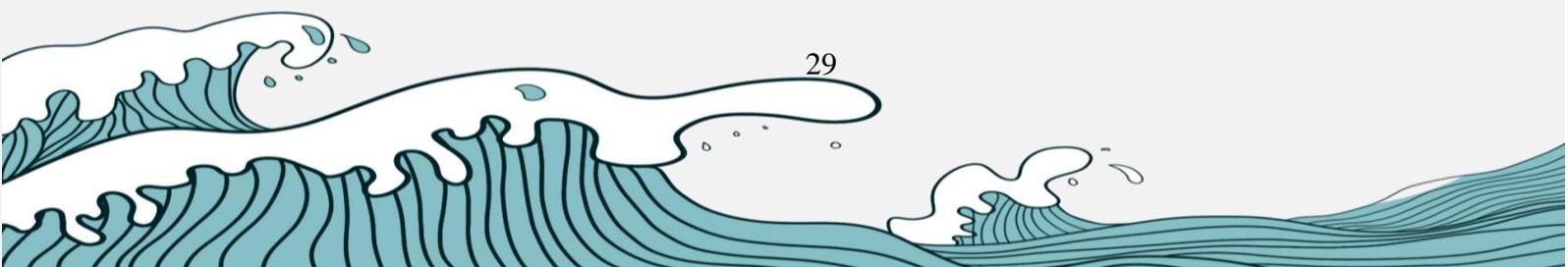
### **Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambangan**

#### **IKU 1 – Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Rp Juta)**

Indikator Nilai PNBPN PPN Pengambangan adalah seluruh penerimaan PPN Pengambangan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan PPN Pengambangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengambangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengambangan terdiri atas penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum berasal dari Pendapatan dari lelang Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu. Sedangkan penerimaan fungsional merupakan pendapatan yang diperoleh Pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang ada di PPN Pengambangan. Kegiatan pelayanan jasa di PPN Pengambangan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan Jasa Tambat Labuh;
- Pelayanan Jasa Air;
- Pelayanan Jasa *Cold Room dan Freezer*;
- Pelayanan Jasa Kendaraan (Truk Refrigerator, Dump Truk dll);
- Pelayanan Jasa Penggunaan Tanah dan/atau bangunan;
- Pelayanan Jasa Penumpukan Barang/Penjemuran jaring/ikan;
- Pelayanan Jasa Pas Masuk;
- Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan;
- Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana;
- Pelayanan Jasa Listrik;

Target indikator ini diukur dengan metode pengukuran triwulanan.



**Tabel 8. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 1		Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 1		Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
526,05	1.114,44	760,79	1.166,84	105%	153%	350	333%

**a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

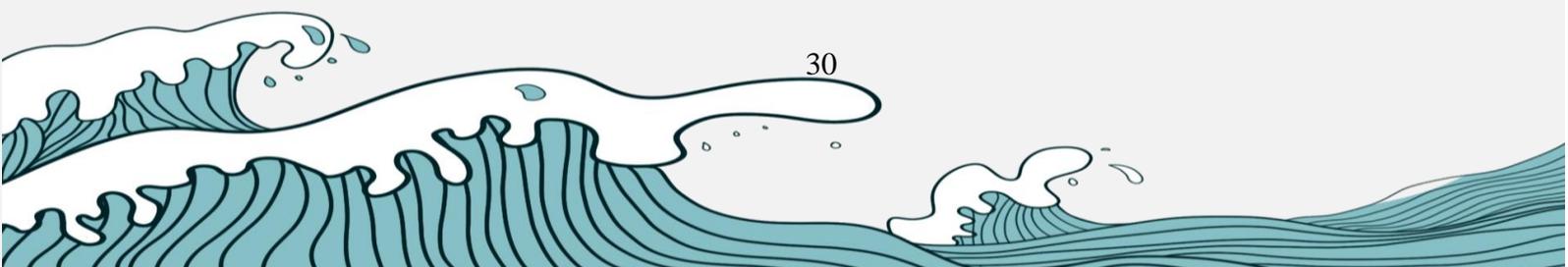
Indikator Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2024 yaitu 760,79 juta rupiah sedangkan realisasi sebesar 1.166,84 juta rupiah atau mencapai 153%. Capaian Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berasal dari Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan SKPT PP Teluk Awang (Pelabuhan Binaan PPN Pengembangan).

**b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 105%. Hal ini disebabkan karena

**c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra**

Berdasarkan data tersebut, indikator Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022) mencapai 333%. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan PNBP dari penggunaan cold storage, tambat labuh dan penggunaan tanah dan bangunan.



#### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

**Tabel 9. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
1.166,84	2059,87	57

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 57%. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penerimaan dan kondisi kepatuhan Masyarakat, dimana di PPN Pengembangan masih banyak kehilangan penerimaan pada pelayanan jasa pas masuk karena masih banyak pintu masuk dan belum menggunakan palang pintu otomatis sehingga mereka dapat leluasa keluar masuk Pelabuhan. Selain itu permasalahan perizinan juga menjadi focus permasalahan yang sampai akhir Tahun 2024 masih ada kapal yang dalam proses penyelesaian perizinan sehingga menghambat penerimaan tambat labuh.

#### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya kenaikan pada penerimaan PNBP di hampir semua jenis pelayanan seperti pada penerimaan jasa jasa penggunaan tanah dan/atau bangunan, jasa kebersihan, jasa penggunaan air, listrik, pas masuk, tambat labuh dan cold storage. Jika dilihat dari penerimaan yang ada, pada tahun 2024 penerimaan di PPN Pengembangan lebih tinggi daripada PP. Teluk Awang, hal ini dikarenakan di PP Teluk Awang, kapal-kapal yang mendaratkan ikan di PP Teluk Awang banyak yang berpindah ke PP. Tanjung Wangi sehingga penerimaan PNBP berkurang dari penerimaan tambat labuh, pas masuk maupun penggunaan tanah. Penerimaan col storage pada tahun 2024 relatif tinggi karena di bulan Januari s.d Juli 2024 cukup tinggi penggunaannya daripada tahun sebelumnya. Sedangkan pada penerimaan Pas masuk sudah meningkat dari tahun sebelumnya meskipun tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan belum adanya pagar kawasan pelabuhan sehingga akses masuk menuju pelabuhan tidak satu pintu/terdapat jalan tikus sehingga banyak yang lolos dari jasa Pas masuk. Kurangnya jumlah petugas pas masuk juga berpengaruh pada penerimaan Pas masuk. Dengan adanya pagar kawasan pelabuhan diharapkan dapat menjadi solusi dari keamanan dan peningkatan penerimaan PNBP di PPN Pengembangan. Selain itu permasalahan perizinan juga



menjadi focus permasalahan yang sampai Triwulan IV masih terdapat kapal yang masih dalam proses penyelesaian perizinan sehingga menghambat penerimaan tambat labuh.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel**

**Tabel 10. Realisasi anggaran mendukung IKU**

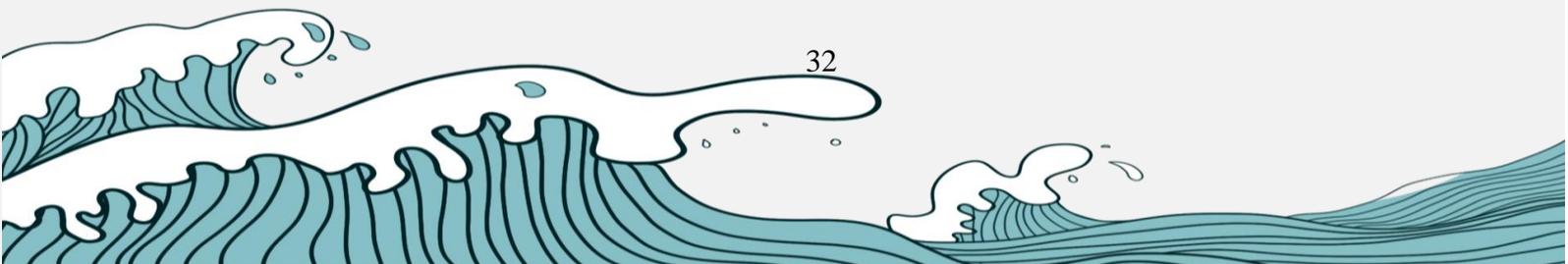
IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	153,34%	389172000	362045740	596.739.503	234.693.763	60%	210%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp-, 362.045.740. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 60%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

**g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari Pelayanan jasa Tambat labuh, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan jasa Pengadaan Air, Pelayanan Listrik, Pelayanan Pas Masuk, Pelayanan Penggunaan Tanah dan bangunan, Pelayanan jasa penggunaan kendaraan/dumptruck, Pelayanan Jasa Penggunaan *Cold Storage* di PPN Pengembangan.

Pendapatan PNBP ini dapat dilakukan dengan maksimal jika penjagaan di pintu masuk dapat dilakukan dengan baik, dengan didirikan pagar Kawasan. Namun jika tidak terdapat pagar Kawasan pengunjung dapat lewat melalui pintu masuk lainnya.



Selain itu penyelesaian proses perizinan perlu dipercepat sehingga dapat meningkatkan penerimaan tambat labuh. Karena dengan adanya kelengkapan dokumen perizinan, maka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dapat berjalan dengan lancar dan pembayaran tambat labuh juga akan langsung dilakukan oleh pengguna jasa.

## Sasaran Strategis 2

### Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan

#### IKU 2 – Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)

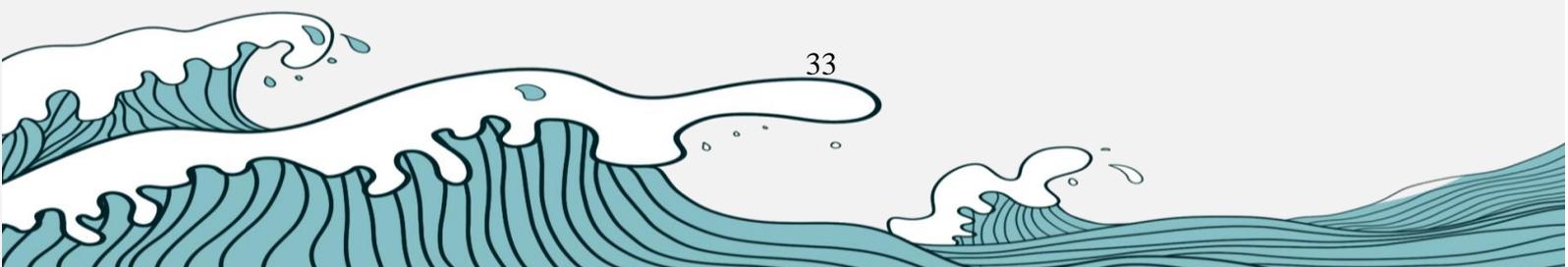
Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan hasil dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan. Realisasi produksi perikanan tangkap PPN Pengembangan dilaporkan secara berkala setiap triwulan.

**Tabel 11. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 2		Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 2		Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
4.800	14.057	14.479	23.493	167	162	13.200	178%

#### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan atau binatang air bahkan tanaman air yang ditangkap, baik yang dijual maupun dikonsumsi sendiri oleh nelayan atau rumah tangga perikanan. Produksi perikanan di PPN Pengembangan didominasi oleh hasil perikanan tangkap nelayan dari perairan laut. Indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton) memiliki



realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2024 yaitu 14.479 ton sedangkan realisasi sebesar 23.493 ton atau sebesar 162%.

Jumlah realisasi dapat melebihi target karena didukung dengan cuaca yang baik pada awal tahun 2024 yang menyebabkan kapal perikanan dapat melakukan usaha penangkapan lebih optimal sehingga hasil produksi meningkat.

#### b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 167%. Realisasi Tahun 2024 sebesar 23.493 ton sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 14.057 ton. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi pada tahun 2024 yaitu jumlah trip dan jumlah kapal bongkar pada tahun 2024 lebih tinggi yaitu 4826 kapal dibandingkan tahun 2023 yang hanya 3133 kapal.

#### c. Perbandingan realisasi indicator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022) mencapai 178%. Realisasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan target tersebut karena tersebut di

#### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

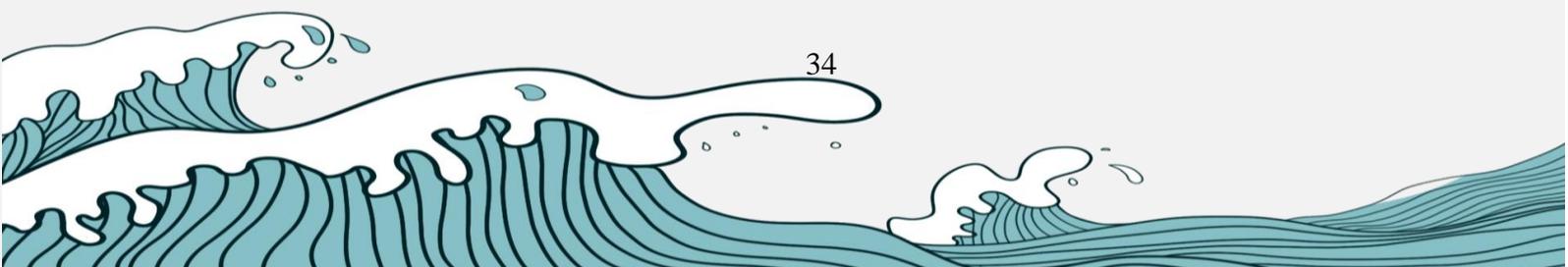
**Tabel 12. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
23.493	20.918,45	112

Jika dibandingkan dengan capaian di PPN Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan 112%. Faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan yaitu cuaca dan musim ikan serta perbedaan jumlah armada kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan.

#### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Terdapat beberapa faktor produksi yang dapat mempengaruhi produksi hasil tangkapan. Beberapa hal yang mempengaruhi hasil tangkapan yaitu ukuran kapal



(GT), kekuatan mesin (PK), konsumsi bahan bakar minyak (L), panjang jaring (m), dalam jaring (m), jumlah ABK (orang) dan jumlah lampu (unit).

Keberhasilan penangkapan sangat dipengaruhi oleh tingkat upaya penangkapan yang dilakukan oleh nelayan. Upaya penangkapan merupakan ukuran untuk menghasilkan sejumlah hasil tangkapan atau ukuran produktivitas dari unit penangkapan ikan. Jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Perhitungan jumlah produksi didapatkan dari hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di TPI dan di wilayah operasional PPN Pengembangan. Produksi perikanan tangkap pada Tahun 2024 lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan pada Triwulan IV Tahun 2024 cuaca lebih baik dibandingkan pada Triwulan IV tahun 2023, dan kondisi perairan yang mendukung untuk dilakukan penangkapan ikan, serta jumlah kapal yang melakukan trip mengalami peningkatan.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

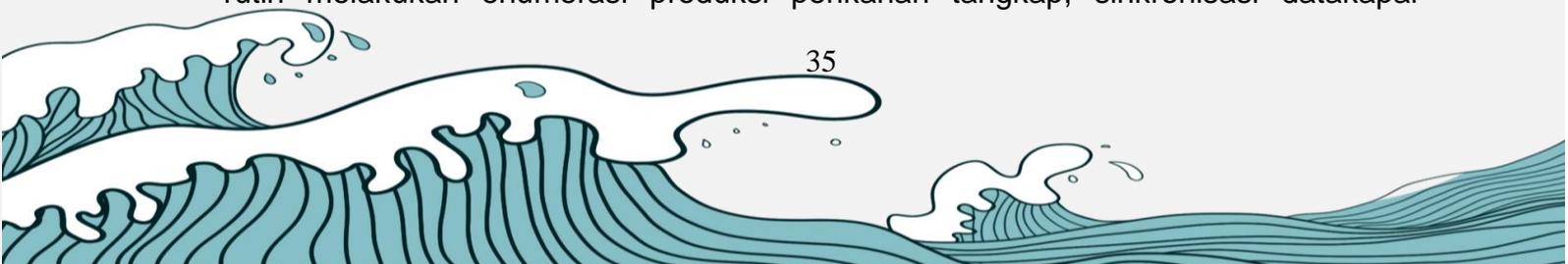
**Tabel 13. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan	162,26%	481.377.000	365.500.496	781.061.528	415.561.032	86%	266%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan sebesar Rp 365.500.496,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 86%.SDM yang menunjang terlaksananya capaian Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan adalah tim kerja Operasional Pelabuhan dan Operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

#### f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program yang dilaksanakan oleh PPN Pengembangan khususnya Tim Kerja Operasional dalam mendukung tercapainya target produksi perikanan tangkap, yaitu rutin melakukan enumerasi produksi perikanan tangkap, sinkronisasi data kapal



bongkar dengan Kesyahbandaran dan TKPU, dan sinkronisasi data perikanan tangkap dengan TPI dan Dinas Perikanan Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan kegiatan pendataan yang telah dilakukan, hingga Tahun 2024 jumlah produksi mencapai 23.493 ton. Nilai produksi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai produksi pada Triwulan IV Tahun 2023 dan juga lebih tinggi dari target yang telah ditentukan.

Program/kegiatan lain yang dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator ini adalah dengan sosialisasi peningkatkan mutu hasil perikanan kepada nelayan dan sosialisasi rutin tentang Prakiraan Cuaca dan Tinggi Gelombang Laut di Wilayah Jembrana melalui grup whatsapp dengan anggota nelayan, yang rutin dilaksanakan setiap hari sebelum berangkat melaut.

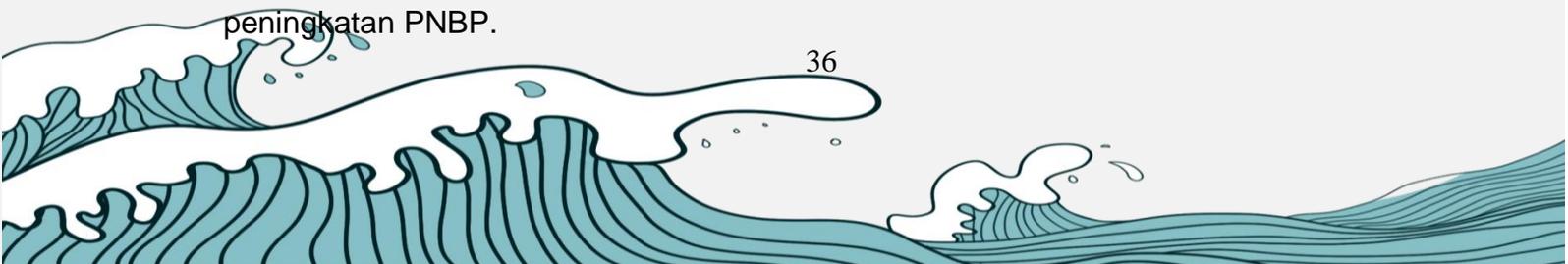
### **Sasaran Strategis 3**

#### ***Pengelolaan PPN Pengembangan yang Berdaya Saing***

#### ***IKU 03 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)***

Indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2024. Permohonan perusahaan dilakukan oleh pelaku usaha pada saat melakukan penggunaan tanah dan atau bangunan baik untuk permohonan baru maupun perpanjangan. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100 persen dengan periode pengukuran tahunan.

Kegiatan perusahaan di Pelabuhan perikanan merupakan salah satu tugas dan fungsi Pelabuhan sesuai dengan Permen kelautan dan perikanan nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Pada indikator kinerja ini kegiatan yang dilakukan terkait sosialisasi aplikasi SIJAKA dan SIPAUS, kegiatan Evaluasi Perusahaan, Rapat stake holder dan kegiatan lain yang menunjang perusahaan. Pada kegiatan ini tentunya tidak hanya keberhasilan dalam pencapaian realisasi anggaran saja yang dicapai namun output dari kegiatannya juga perlu diperhatikan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaku usaha lebih memahami aturan yang telah ditetapkan terkait perusahaan sehingga pelaku usaha lebih tertib dalam berinvestasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan dapat berpengaruh pada peningkatan PNBK.



**Tabel 14. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Berdaya Saing					
Indikator Kinerja – 3		Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
100	100	100	100	100	100	-	-

**a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan memiliki realisasi sama dari target yang telah ditentukan. Target dan realisasi tahun 2024 yaitu 100 persen. Pada tahun 2024 terdapat 62 permohonan dimana semua permohonan dianalisis, ditelaah untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan dapat tercapai 100% dikarenakan semua permohonan yang masuk telah diverifikasi dan dianalisis maupun ditelaah sehingga dapat dinilai bahwa permohonan tersebut layak atau tidak.

**b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**

IKU ini memiliki realisasi yang sama dengan Tahun 2023 yaitu 100 persen.

**c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra**

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

**d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional****Tabel 15. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	100	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 100%. Hal ini disebabkan untuk permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan sudah ada standar persyaratan yang wajib dipenuhi pengguna jasa dan adanya evaluasi serta analisis yang sesuai dengan format yang ada.

**e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

Adanya Aplikasi SIPAUS (Sistem Informasi Pelayanan dan Pengusahaan) dapat meningkatkan dan memberikan kemudahan pelayanan pengusahaan sehingga tercapainya indikator permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel**

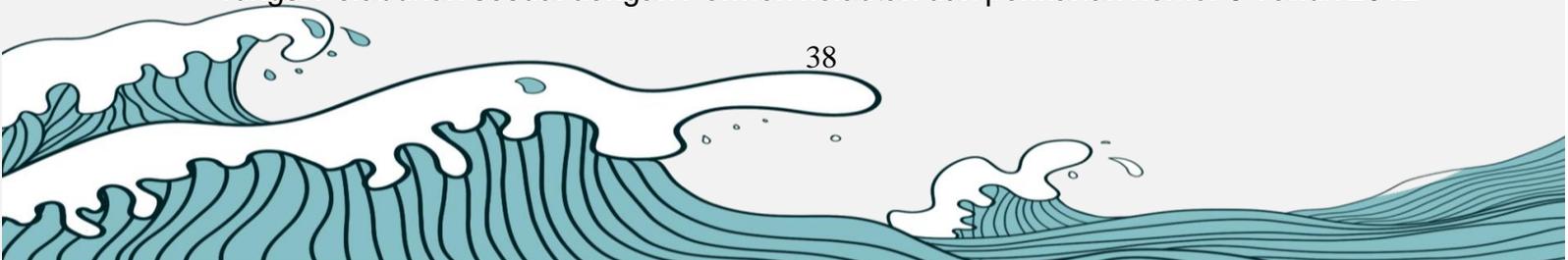
**Tabel 16. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan	100,00%	8.000.000	7.854.500	8.000.000	145.500	2%	55%

Realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan sebesar Rp 7.854.500,. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian adalah tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

**g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan perikanan merupakan salah satu tugas dan fungsi Pelabuhan sesuai dengan Permen kelautan dan perikanan nomor 8 Tahun 2012



tentang Kepelabuhanan Perikanan. Kegiatan ini masuk dalam Program dan Anggaran PPN Pengembangan dengan anggaran sebesar Rp. 199.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.041.784,- atau capaian sebesar 99,53%. Pada indikator kinerja ini kegiatan yang dilakukan terkait pelayanan perusahaan, sosialisasi aplikasi SIJAKA dan SIPAUS, kegiatan Evaluasi Perusahaan, Sosialisasi SOP Pelayanan Usaha dan Pengukuran Tingkat Pelayanan Usaha. Pada kegiatan ini tentunya tidak hanya keberhasilan dalam pencapaian realisasi anggaran saja yang dicapai namun output dari kegiatannya juga perlu diperhatikan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaku usaha lebih memahami aturan yang telah ditetapkan terkait perusahaan sehingga pelaku usaha lebih tertib dalam berinvestasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dan dapat berpengaruh pada peningkatan PNBP.

#### ***IKU 04 - Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)***

Indikator ini merupakan nilai tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Penilaian indikator kinerja pelabuhan perikanan sesuai standar yang telah ditetapkan adalah dengan mengumpulkan laporan operasional untuk dievaluasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh Direktorat jenderal Perikanan Tangkap melalui SK. No 20/KEP/DJPT/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan. Dengan adanya indeks/nilai operasional pelabuhan perikanan maka dapat menjadi acuan sebagai indikator dalam mengukur perkembangan kinerja operasional.

**Tabel 17. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Berdaya Saing					
Indikator Kinerja – 4		Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
83	90,39	84	99,33	110	118	82	121

### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2024 yaitu dengan nilai 84 sedangkan realisasi sebesar 99,33 atau sebesar 118%.

### b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 110 %. Realisasi tahun 2024 sebesar 99,33 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 90,39. Faktor yang mempengaruhi capaian tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 karena jumlah produksi yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023, sehingga berpengaruh pula terhadap meningkatnya faktor lain yaitu seperti jumlah kunjungan kapal, jumlah penyaluran perbekalan dan BBM, jumlah tenaga kerja, dan jumlah PNPB, sehingga realisasi tingkat kinerja PPN Pengembangan Tahun 2024 dapat terpenuhi, dengan nilai 99,33 atau tergolong kategori kinerja pelabuhan perikanan “sangat baik”.

### c. Perbandingan realisasi indicator tahun 2024 terhadap Renstra

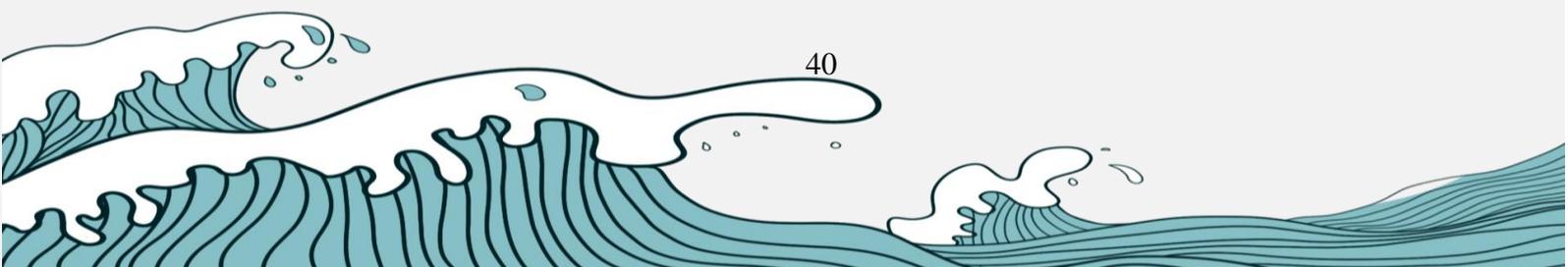
Berdasarkan data tersebut, indicator tingkat kinerja PPN Pengembangan pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022) mencapai 121%. Hal tersebut dapat tercapai selain dari faktor jumlah produksi yang meningkat dan menyebabkan nilai indikator lain juga meningkat, juga didukung dengan kompetensi petugas di lapangan maupun petugas administrasi dalam menghimpun dan menginput data di aplikasi, sehingga nilai indikator kinerja dapat memuaskan setiap bulannya selama tahun 2024.

### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

**Tabel 18. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
99,33	97,42	102

Jika dibandingkan dengan capaian di PPN Prigi, capaian di PPN Pengembangan mencapai 102%.



### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan nilai realisasi Tingkat Kinerja Operasional Pelabuhan pada Tahun 2024 yaitu 99,33 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan PPN Pengembangan berjalan efektif dan optimal menunjang pengembangan pelabuhan perikanan yang lebih baik. Dengan adanya penilaian indikator ini maka dapat menjadi evaluasi setiap bulannya tentang capaian kinerja pelabuhan dan dapat juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan pada aplikasi PIPP dilakukan setiap bulan dan selanjutnya akan dianalisa pada setiap indikator. Ruang lingkup penilaian antara lain :

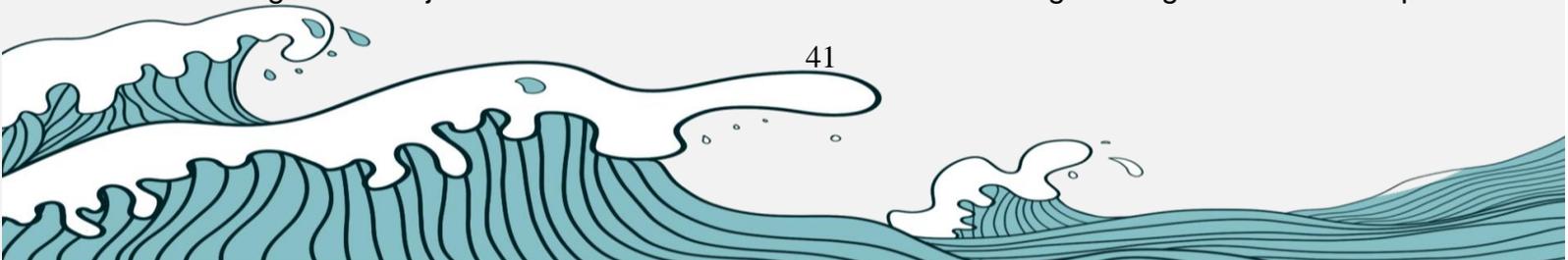
1. Aktivitas kapal di pelabuhan perikanan;
2. Produksi dan distribusi ikan di pelabuhan perikanan;
3. Tenaga kerja di pelabuhan perikanan;
4. Penyaluran perbekalan di pelabuhan perikanan;
5. Pendapatan pelabuhan perikanan;
6. Prasarana pelabuhan perikanan;
7. Industri di pelabuhan perikanan, dan
8. Kelembagaan di pelabuhan perikanan.
9. Pemasok Perbekalan berupa air bersih, es dan bahan bakar solar
10. Pendistribusian Ikan (Ikan Keluar Pelabuhan)

### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

**Tabel 19. Realisasi anggaran untuk mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	118,25%	210.984.000	183.440.094	294.488.580	66.048.486	31%	128%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp



183.440.094,-.Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 31%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kinerja PPN Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim kerja dan operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

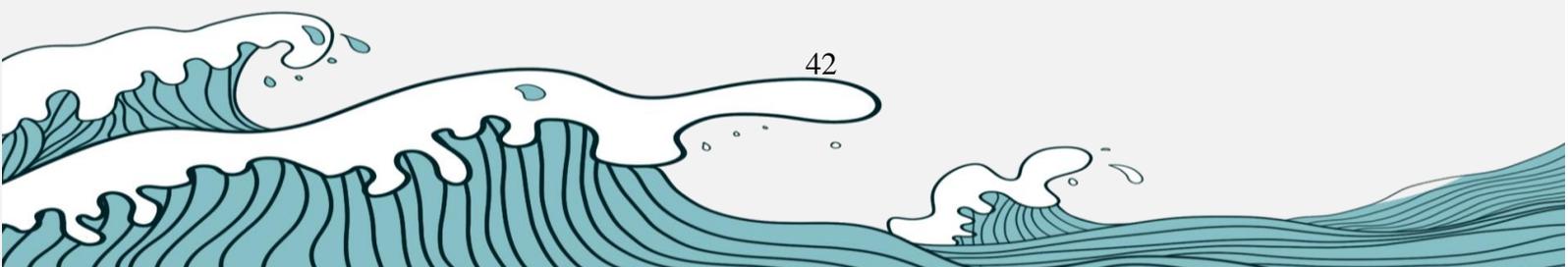
**g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang kinerja**

Program yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target Tingkat Kinerja Operasional Pelabuhan yaitu pelaksanaan enumerasi data produksi perikanan tangkap yang rutin dilaksanakan setiap harinya. Program atau kegiatan lain yang dapat menunjang tercapainya nilai yang maksimal yaitu kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, serta publikasi kegiatan yang diadakan maupun dilaksanakan oleh PPN Pengembangan. Indikator atau program lain yang masih memiliki peluang untuk dapat ditingkatkan yaitu fasilitasi perizinan kapal perikanan, dan peningkatan pengusaha pada WKOPP PPN Pengembangan.

***IKU 05 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)***

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam hal ini *Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran* adalah kegiatan pelayanan public atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesyahbandaran seperti Permohonan Persetujuan Berlayar, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal dll terkait operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan yang diajukan oleh pengguna jasa di pelabuhan.



**Tabel 20. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengembangan yang Berdaya Saing					
Indikator Kinerja – 5		Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
80	100	84	100	100	119	-	-

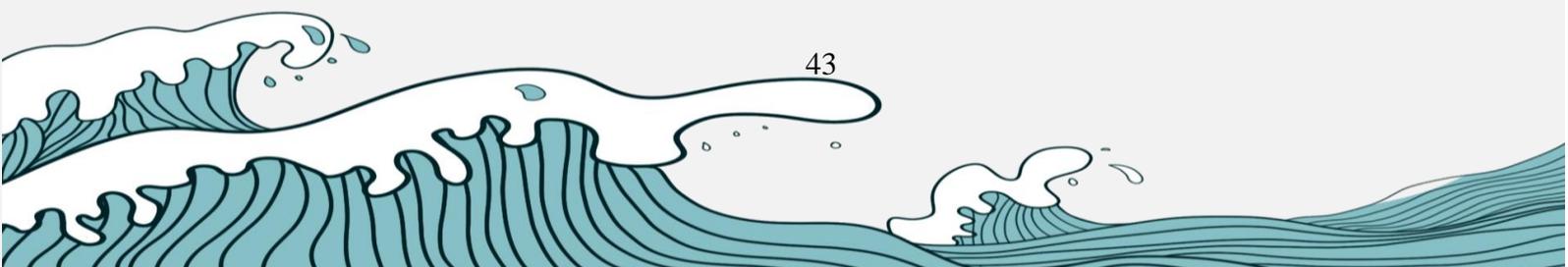
#### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2024 sebesar 84 persen dan realisasi sebesar 100 persen. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dapat tercapai karena faktor antara lain :

1. PPN Pengembangan telah mencanangkan program yaitu Wilayah Bebas korupsi (WBK) dimana didalamnya ada poin poin dalam peningkatan kualitas pelayanan public sehingga ada peningkatan dari segi petugas pelayanan, fasilitas dll sehingga dapat menunjang pelayanan public yang baik
2. Keterbukaan informasi pelayanan yang mudah diakses sehingga persyaratan aturan dll dapat dipahami oleh pengguna jasa sehingga berkas permohonan yang masuk adalah permohonan yang sudah sesuai dengan persyaratan sehingga langsung dapat dilayani dengan baik
3. Sosialisasi yang cukup efektif dengan pengguna jasa terkait aturan aturan baru dan komunikasi yang baik sehingga dapat menunjang kinerja pelayanan public di PPN Pengembangan

#### b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

IKU ini memiliki realisasi yang sama dengan Tahun 2023 yaitu 100 persen. namun untuk aktivitas pelayanan SPB dan STBLKK mengalami peningkatan.



c. **Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra**

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

d. **Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional**

**Tabel 21. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	51,46	194

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 194%. Hal ini disebabkan karena kerjasama dan komunikasi yang baik antara petugas pelayanan publik dan pengguna jasa sehingga dalam rangka meningkatkan pelayanan kita bersifat terbuka dalam menerima masukan dll agar pelayanan tidak terhambat dan dapat terlayani 100 %

h. **Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

Setiap unit kerja pemerintah dituntut untuk menjalankan program berdasarkan IKU yang telah ditetapkan serta menata manajemennya dengan baik. Tujuan dasar adalah bagaimana dalam hal ini IKU terkait tingkat pelayanan kesyahbandaran dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan suatu unit kerja dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berkomunikasi dengan pengguna jasa dalam rangka menginformasikan aturan aturan yang telah dibuat . dalam hal ini komunikasi menjadi sangat penting dalam menjalankan program program antara pemerintah dengan pelaku usaha yang dibatasi dengan koridor koridor aturan sehingga hal itu yang kadang menjadi kendala sehingga pelayanan terkesan menyulitkan aturan yang tumpang tindih dll. Sehingga komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalankan program pemerintah. Sehingga dalam meningkatkan pelayanan kesyahbandaran perlu adanya komunikasi antar pengguna jasa dan unit pelayanan public yaitu PPN Pengembangan

i. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel**



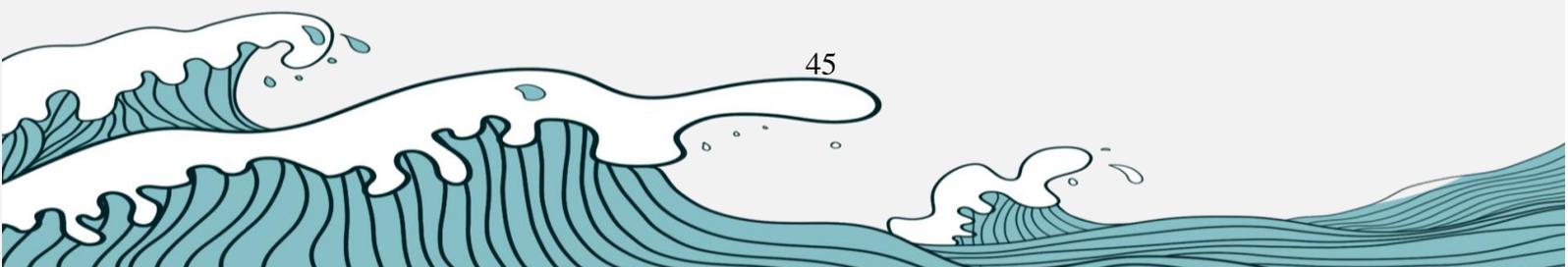
**Tabel 22. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	100%	505.872.000	143.185.012	505.872.000	362.686.988	72%	229%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 143.185.012,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 72%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran adalah Tim Kerja Kesyahbandaran sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

**j. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dukungan kegiatan sosialisasi sosialisasi yang cukup sehingga akan mengurangi miss informasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami satu sama lain dengan lebih baik dalam menjalankan program program yang ada. bahwa komunikasi pemerintah sangat penting dilakukan terutama dalam hal pelayanan publik. Komunikasi pemerintah menjadi titik utama dalam suksesnya keberlangsungan pelayanan publik guna mewujudkan good governance sebab pemerintah berperan sebagai komunikator yang menyalurkan berbagai info pada masyarakat dan mempersuasi masyarakat agar turut aktif dalam pengembangan sumber daya publik.



#### Sasaran Strategis 4

#### Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal

#### IKU-06 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Pengendalian pengembangan fasilitas merupakan indikator terkait fasilitas pada Pelabuhan yang tersedia dibandingkan fasilitas yang ada pada master plan. Dalam Masterplan PPN Pengembangan Tahun 2021 terdapat luasan lahan 103,63 ha sedangkan eksisting luasan saat ini 13,5 ha.

**Tabel 23. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 4		Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal					
Indikator Kinerja – 6		Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
70	70,45	10,31	11,28	16	109	-	-

##### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2024 sebesar 10,31 dan realisasi sebesar 11,28 persen. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dengan menggunakan master plan tahun 2021 masih rendah dikarenakan pengembangan Pelabuhan baru akan dimulai di tahun 2025 dan secara bertahap sampai dengan 2028. Namun dilihat dari penggunaan tanahnya saat ini masih mencapai target walaupun kecil persentasenya. Dengan adanya pengembangan PPN Pengembangan melalui anggaran PHLN dari IsDB diharapkan fasilitas yang tersedia dapat bermanfaat bagi Masyarakat.

##### b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu



Pada tahun 2024 realisasi IKU ini lebih rendah dari 2023 sebesar 16%, hal terjadi karena perhitungan dari IKU tersebut berbeda dimana pada tahun 2023 menggunakan master plan tahun 2009 dengan fasilitas yang lebih sedikit dari pada tahun 2024 yang menggunakan master plan 2021 yang menjadi dasar dari pengembangan PPN Pengembangan melalui dana PHLN dari IsDB.

**c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra**

*Berdasarkan data tersebut,* IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

**d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional**

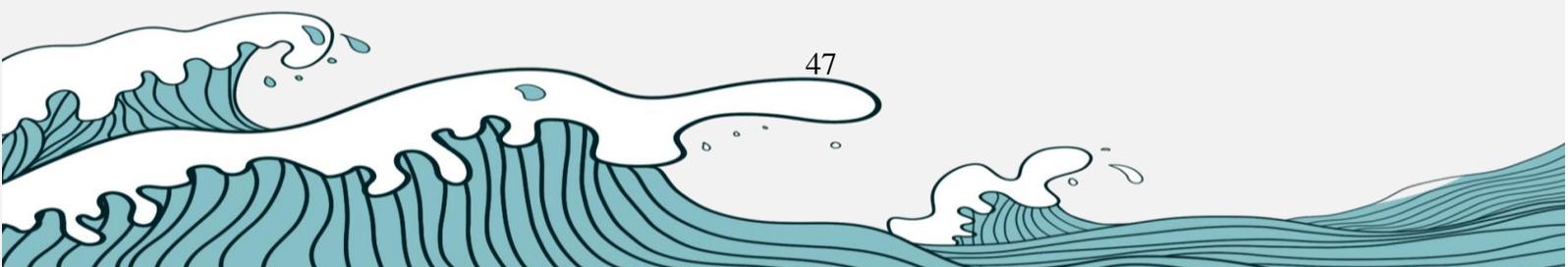
**Tabel 24. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
11,28	74,66	15

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan hanya mencapai 15%. Hal ini disebabkan karena Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi lebih dulu menjadi UPT DJPT dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sejak tahun 2007 menjadi UPT DJPT sehingga fasilitas PPN Prigi lebih lengkap. Selain itu acuan perhitungan dari IKU ini menggunakan master plan tahun 2021 dimana master plan ini menjadi acuan kegiatan pembangunan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang akan dimulai pada tahun 2025.

**e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

Pada IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sudah tercapai dengan persentase 100,64% namun untuk dapat mencapai realisasi standar nasional dengan diberikan anggaran untuk Pengembangan Fasilitas karena sejak tahun 2017 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tidak diberikan anggaran untuk Pengembangan Fasilitas. Dan tahun 2024 PPN Pengembangan menerima anggaran untuk pengembangan



pelabuhan melalui dana PHLN dari IsDB. Kegiatan ini akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2028.

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

**Tabel 25. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	109,41%	1.563.000.000	1.493.100.617	1.710.052.376	216.951.759	14%	85%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 1.493.100.617,-. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 14%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

#### g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada IKU Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan yang dilakukan oleh PPN Pengembangan sebesar Rp. 725.415.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 723.814.435,- atau mencapai 99,78%. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemeliharaan terkait fasilitas Pelabuhan sehingga fasilitas yang ada dapat digunakan secara maksimal. Adapun pemeliharaan yang dilakukan terkait pemeliharaan bangunan Gedung dan bangunan, Peralatan dan mesin, jaringan air dan

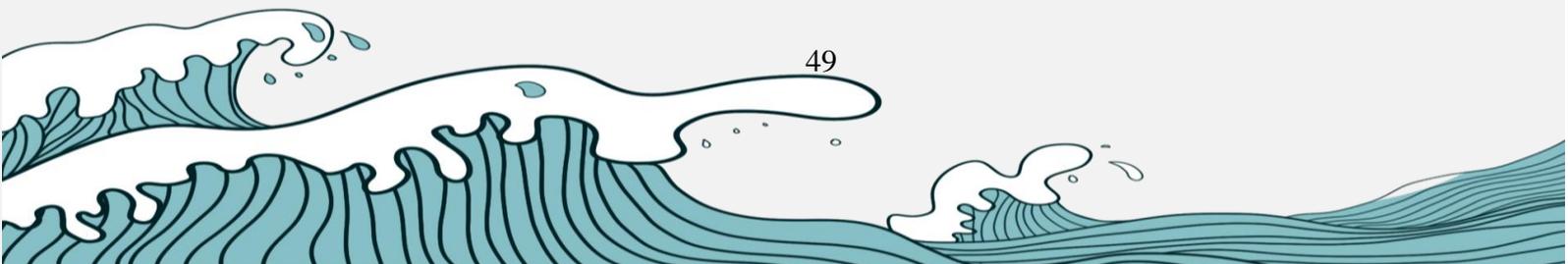
listrik, jaringan drainase, jalan dan jembatan. Selain itu tahun 2024 PPN Pengembangan menerima anggaran sejumlah Rp. 413.000.000,- dari anggaran pengembangan PPN Pengembangan melalui dana hibah dari IsDB dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 354.088.579,- atau mencapai 85,74%. Kegiatan ini dapat tercapai dengan adanya Kerjasama dari seluruh tim kerja di PPN Pengembangan. Membangun Tim Kerja yang solid sangat diperlukan dalam pencapaian target dari kinerja Pelabuhan.

### ***IKU 07 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)***

Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Pengendalian Lingkungan merupakan indikator yang memuat kegiatan yang dilakukan dalam menjaga kondisi lingkungan yang sesuai dengan standar. Kegiatan ini juga di pantau melalui aplikasi SELARASKAN (Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan).

**Tabel 26. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 4		Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal					
Indikator Kinerja – 7		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
30,01	74,6	30,1	92,62	124	308	-	-



### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2024 sebesar 30,01 dan realisasi sebesar 92,62. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dapat tercapai karena Kerjasama dari Tim Kerja sehingga kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan aplikasi pada SELARASKAN dapat dilakukan sehingga mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin.

### b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, persentase realisasi Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2023, yaitu sebesar 124 persen. Hal ini disebabkan karena petugas dan tim selaraskan sudah memahami permintaan dari aplikasi dan membuat data dukung sesuai dengan yang diminta pada aplikasi.

### c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022). Hal ini disebabkan karena Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan baru terdapat di Perjanjian Kinerja mulai tahun 2023.

### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

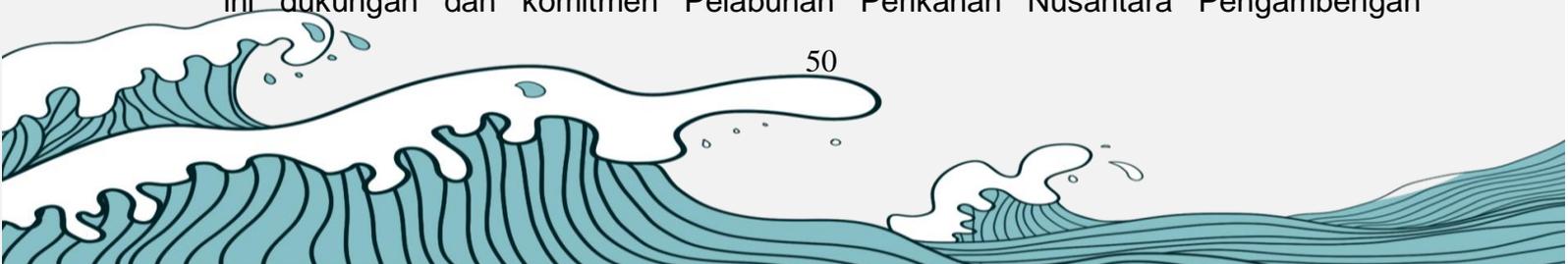
**Tabel 27. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
92,62	96,39	96

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 96%. Hal ini disebabkan karena perbedaan fasilitas yang tersedia di masing-masing Pelabuhan.

### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pada IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sudah tercapai sangat baik dengan persentase 308%, keberhasilan ini dukungan dan komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan



memenuhi penilaian yang dipersyaratkan pada aplikasi SELARASKAN. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian ini perlu adanya sosialisasi pihak-pihak tertentu terkait data dukung untuk penilaian serta ketersediaan anggaran yang cukup untuk memenuhi kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan pada aplikasi SELARASKAN.

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

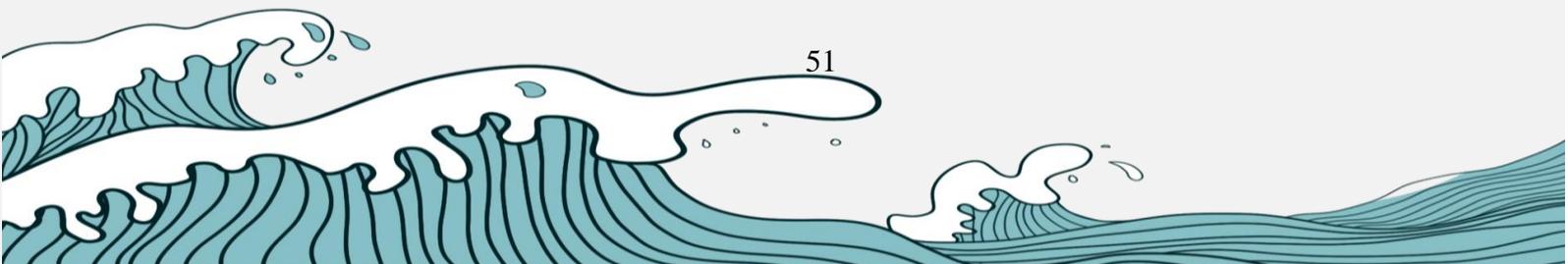
**Tabel 28. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	307,71%	260.038.000	246.276.351	800.156.796	533.880.445	213%	582%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 246.276.351 ,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 213%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dan Operator Selaraskan sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

#### b. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini yakni kegiatan terkait uji kualitas air dan udara yang dilakukan setiap semester. Dengan adanya ketersediaan anggaran untuk uji kualitas ini diharapkan nilai dari Selaraskan dapat lebih maksimal. Adapun Uji yang dilakukan melalui Laboratorium BPISDKP dan Hyperkes serta Unilab. Selain uji kualitas air dan uji kualitas udara, kegiatan lain yang menunjang seperti kegiatan kebersihan, pemeliharaan, hemat energi juga dapat



menunjang penilaian dalam selaraskan. Sehingga perlu adanya Kerjasama dalam Tim Kerja Pelabuhan dalam pencapaian indikator tersebut.

### **Sasaran Strategis 5**

#### **Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan**

##### **IKU-08 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)**

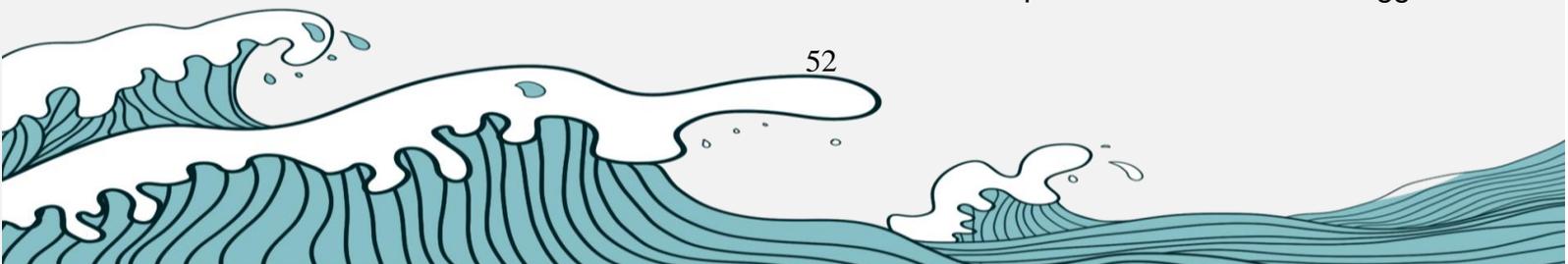
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan merupakan Indikator laporan atas hasil pelaksanaan perijinan terhadap kapal perikanan yang terdaftar di PPN Pengembangan, antara lain Sertifikat Kelaiakan Kapal Perikanan (SKKP). SKKP adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan untuk keselamatan pelayaran. PPN Pengembangan sebagai UPT DJPT KKP melayani pengurusan SKPP dengan kapal yang memiliki ijin daerah dengan ukuran kapal dibawah 30 GT.

**Tabel 29. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 5		Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
50	1.003	1.043	1.430	104	137	-	-

#### **a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target Triwulan 2024 sebesar 1043 dokumen dan realisasi sebesar 1430 dokumen. Realisasi pada indikator ini lebih tinggi



dari target karena pelayanan penerbitan SKKP di PPN Pengembangan mencakup Bali, NTT dan NTB, serta permohonan pemeriksaan kelaikan kapal juga tinggi setiap bulannya.

#### b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, persentase realisasi Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2023, yaitu sebesar 137 persen, karena permohonan penerbitan SKKP lebih tinggi dan dapat dilakukan secara daring, sehingga memudahkan pemilik kapal/nelayan dalam mengajukan permohonan.

#### c. Perbandingan realisasi indicator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indicator ini pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022). Hal ini disebabkan karena Indikator Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan baru terdapat di Perjanjian Kinerja mulai tahun 2023.

#### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

**Tabel 30. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
1430	486	294

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 294%. Hal ini disebabkan karena tingginya permohonan penerbitan SKKP dan jangkauan daerah pelayanan penerbitan SKKP yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan lebih luas dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

#### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Penerbitan SKKP di PPN Pengembangan pada Tahun 2024 yaitu 1430 dokumen, dan telah mencapai target tahunan, target tahun 2024 sebesar 1043 dokumen. Jumlah sertifikat tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan kelaikan kapal



perikanan yang telah dilaksanakan oleh petugas kelaikan, mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tingginya pengajuan penerbitan SKKP yang mencakup ketiga provinsi tersebut merupakan salah satu faktor yang menunjang tercapainya target penerbitan SKKP Tahun 2024 dapat tercapai. Serta di Kabupaten Jembrana dokumen SKKP menjadi persyaratan bagi nelayan untuk mendapatkan rekom BBM subsidi, sehingga penerbitan SKKP di PPN Pengembangan pada triwulan IV cukup tinggi.

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

**Tabel 31. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	137,10%	24.900.000	24.875.653	34.139.022	9.263.369	37%	143%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan sebesar Rp 24.875.653,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 37%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator SKKP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

#### g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung IKU ini yaitu pendampingan petugas kepada nelayan/pemilik/perusahaan kapal perikanan terkait mekanisme penerbitan perijinan SKKP, yang meliputi proses pengajuan maupun syarat yang harus dipenuhi baik dokumen kapal, dan perlengkapan keselamatan kapal yang harus ada saat proses pemeriksaan kelaikan kapal perikanan berlangsung. Masa berlaku SKKP hanya satu tahun sehingga kapal wajib memperpanjang SKKP apabila



masa berlaku telah berakhir, dengan sebelumnya dilakukan cek fisik kapal untuk memastikan kapal perikanan tersebut laik laut, laik tangkap, dan laik simpan.

### **Sasaran Strategis 6**

#### ***Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan***

##### ***IKU-09 - Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)***

Menurut PP 27 tahun 2021 Bidang perikanan bahwa Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. Dalam Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Paragraf 1 Persyaratan Kerja di Kapal Perikanan Pasal 141 bahwa Setiap Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja harus memenuhi persyaratan:

- a. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan harus memiliki kartu identitas diri;
- b. memiliki buku pelaut Awak Kapal perikanan;
- c. memiliki Kompetensi;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. terdaftar sebagai peserta jaminan
- f. memiliki PKL; dan
- g. disijiil.

Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah kesepakatan tertulis antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau Nakhoda atau agen awak Kapal Perikanan. Kemudian Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai Awak Kapal Perikanan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan. Maka dari itu setiap awak kapal yang akan bekerja di kapal perikanan wajib melaksanakan pemenuhan awak kapal perikanan yang sesuai PP 27 Tahun 2021 tentang Bidang perikanan.

Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023.



Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan syarat pemenuhan awak kapal yang bekerja di kapal perikanan.

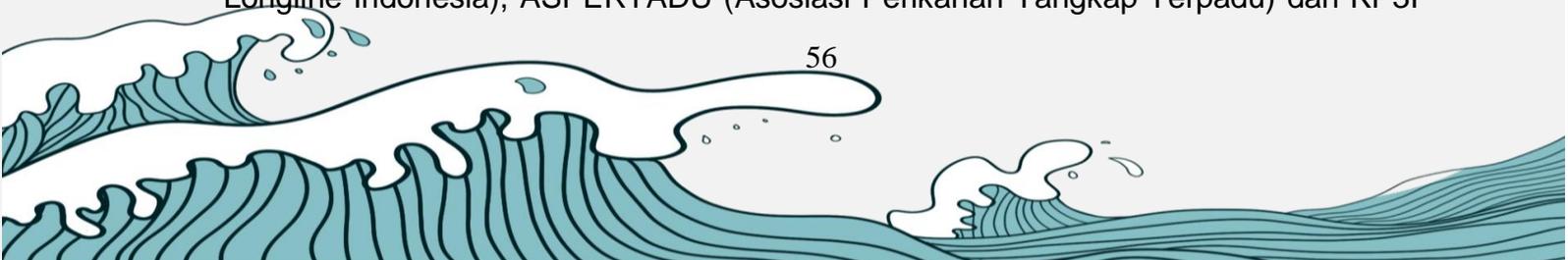
**Tabel 32. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 6		Pengelolaan awak kapal perikanan tersertifikasi/terlindungi di PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 9		Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan (persen)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
20	71	25	74,4	105	298	-	-

#### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2024 sebesar 25 persen dengan realisasi sebesar 298 persen. Tingkat Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan karena faktor antara lain :

1. Untuk pelayanan di pos pelayanan ppn pengembangan di benoa hal ini dikarenakan sudah menerapkan aturan dari Permen KP 33 terkait pengawakan kapal sehingga kapal kapal yang akan melaksanakan keberangkatan kapal akan melengkapi awak kapalnya dengan Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan yaitu kompetensi, siji, buku pelaut, PKL, asuransi dll
2. Pengguna jasa yang sebagian besar di benoa adalah perusahaan sehingga penerapan aturan sangat dimungkinkan
3. Komunikasi yang baik dan kerjasama dengan organisasi seperti ATLI (Asosiasi Tuna Longline Indonesia), ASPERTADU (Asosiasi Perikanan Tangkap Terpadu) dan KP3I



(Kesatuan Pekerja Pelaut perikanan Indonesia) cabang Bali terkait pemenuhan persyaratan awak kapal perikanan.

**b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**

Berdasarkan data tersebut di atas, persentase realisasi Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2023, yaitu sebesar 105 persen.

**c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra**

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

**d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional**

**Tabel 33. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
74,4	33	225

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 225 %. Yang menjadi kunci adalah Komunikasi yang baik dengan perusahaan, organisasi organisasi seperti KP3I, ATLI , Aspertadu dll dalam rangka penyampaian aturan kebijakan terkait pengawakan kapal perikanan sehingga hambatan hambatan dapat diminimalisir kemudian dukungan terkait sosialisasi sosialisasi dengan pengguna jasa yang cukup dan kesadaran pengguna jasa terhadap aturan yang dilakukan pemerintah. PPN Pengembangan juga memfasilitasi atau menyediakan tempat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pelayanan terkait perlindungan awak kapal perikanan.

**e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

Keberhasilan dalam pemenuhan awak kapal perikanan ini dipengaruhi oleh kesadaran dari pelaku usaha agar selalu mematuhi aturan yang berlaku dan komitmen dari ppn pengembangan untuk mendukung dan mencari solusi ketika hambatan dalam pelaksanaan aturan itu terjadi seperti kerjasama dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikat pengawakan dan komunikasi dengan direktorat pengawakan



di KAPI dalam pemenuhan aturan awak kapal perikanan, kegagalan yang terjadi biasanya karena memang kapal kapal masih tradisional kemudian kurangnya informasi terkait pemenuhan dokumen dan belum meratanya lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat awak kapal diseluruh Indonesia sehingga itu menjadi salah satu kendala serta pendekatan kepada pelaku usaha dalam menginformasikan aturan yang berlaku

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

**Tabel 34. Realisasi anggaran mendukung IKU**

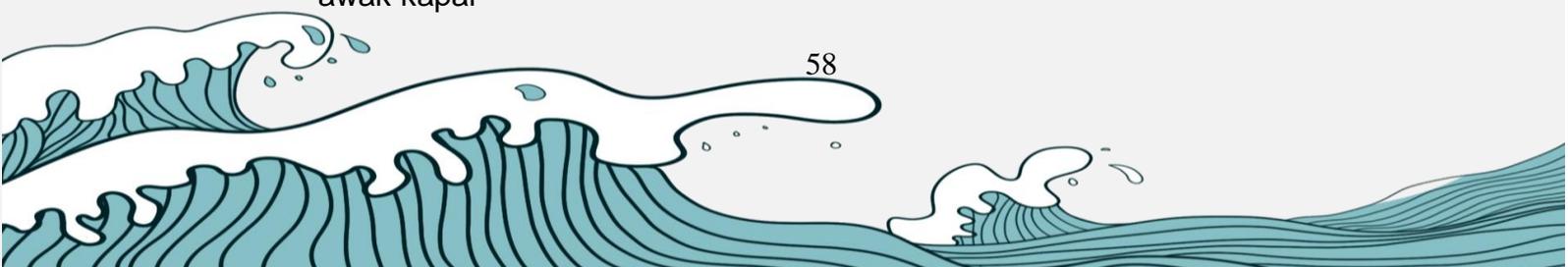
IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	295,24%	13.100.000	10.460.000	38.676.190	28.216.190	215%	588%

SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan adalah Tim Kerja Kesyahbandaran sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

#### g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai keberhasilan tersebut ada beberapa langkah langkah yang sudah dilakukan yaitu :

1. Komunikasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, HNSI, Serikat pekerja (KP3I Cabang Bali), ATLI ASOSIASI TUNA LONGLINE INDONESIA terkait kebijakan pengawakan kapal perikanan
2. Menjalin komunikasi dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikat pengawakan seperti Balai Balai Pelatihan dalam rangka pemenuhan sertifikat awak kapal



3. Komunikasi dan koordinasi dengan direktorat pengawakan KAPI terkait kendala kendala yang terjadi dalam pemenuhan pengawakan kapal perikanan
4. Komitmen ppn pengembangan yaitu syahbandar dalam melaksanakan aturan tersebut kepada kapal kapal yang akan melaksanaakan clearance

### **Sasaran Strategis 7**

#### **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan**

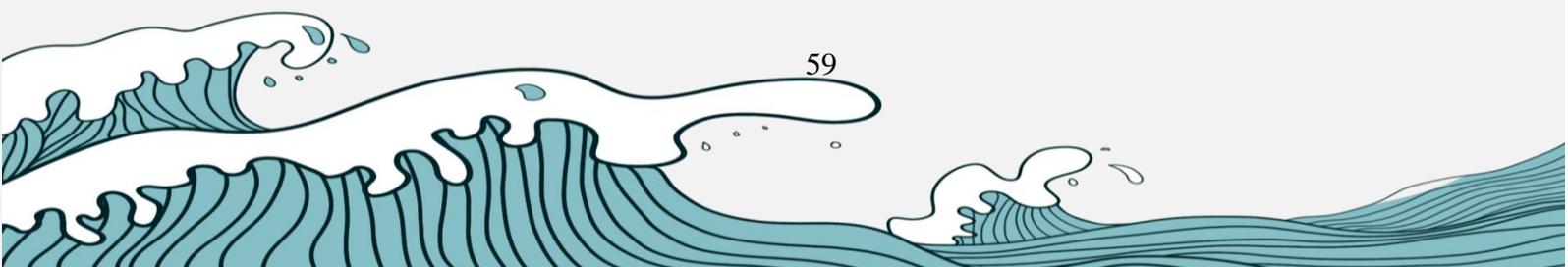
#### **IKU- 10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator yakni (1) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (2) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (3) Nilai PM SKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (4) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Pengembangan” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Penilai Internal (TPI)

Inspektorat Jenderal Bidang V Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

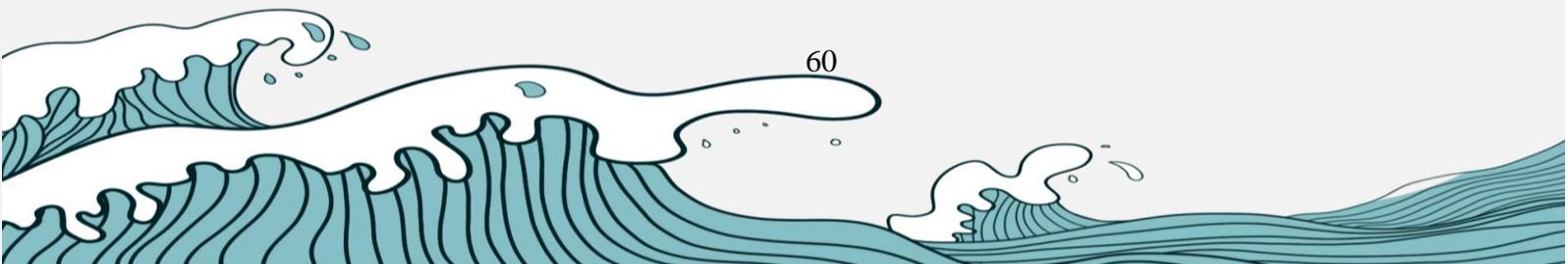
- a) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akandinilai;
- b) Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- c) Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE)serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- d) Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- e) Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- f) Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi



(WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Komponen penilaian terdiri atas 2 (dua) komponen dengan beberapa area perubahan yakni sebagai berikut :

- (1) Komponen Proses/Pengungkit, mencakup 8 (delapan) area perubahan antara lain:
  - a. Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian: Tim Pembangunan ZI, Roadmap Pembangunan ZI, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja
  - b. Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian : Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik
  - c. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian : Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem informasi Kepegawaian,
  - d. Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian : Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,
  - e. Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian : Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas, APIP
  - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan teknologi Informasi
- (2) Komponen Hasil
  - a. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Korupsi dan Opini BPK,



b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 45,10 persen dengan periode pengukuran tahunan. Target indikator ini didasarkan pada PPN Pengembangan yang belum diajukan menjadi Unit Kerja yang akan dinilai WBK, sehingga seluruh penilaian masih berupa penilaian mandiri pada LKE WBK.

**Tabel 35. Rincian Capaian Indikator**

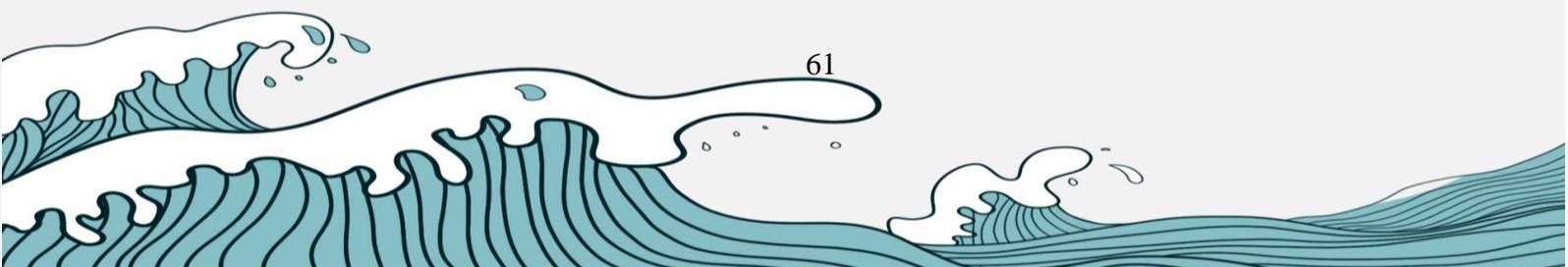
Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 10		Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
45,10	80,75	45,10	55,24	68	122	45,10	122

**a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2024 sebesar 45,10 persen dengan realisasi yaitu 55,24 persen.

**b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 68%.



### c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 122%.

### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

**Tabel 36. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
55,24	91,84	60

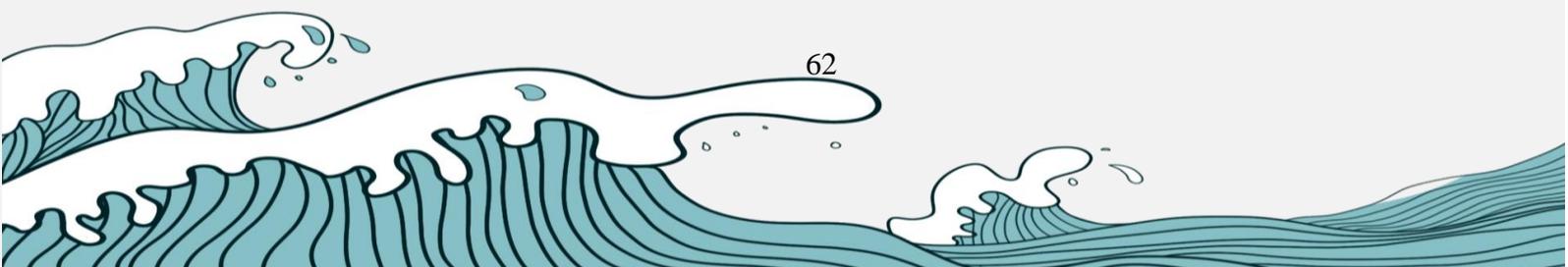
Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 60%.

### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan unsur penunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani public, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Telah dilakukan pemeriksaan dokumen WBK oleh ORTALA DJPT Pada tahun 2022. Upaya selanjutnya adalah terus melengkapi kelengkapan dokumen dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel



**Tabel 37. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan	122,48%	12.700.000	4.500.000	15.555.388	11.055.388	87%	268%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan sebesar Rp 4.500.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 87%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

**g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi PPN Pengembangan yang merupakan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diatur oleh Kemenpan RB dan telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal KKP.

***IKU- 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)***

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mengacu pada jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada setiap triwulan yang telah ditindaklanjuti (berstatus

proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

**Tabel 38. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
75	97	80	66,67	69	83	-	-

**a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih rendah dari target yang telah ditentukan sebesar 83 persen. Target Tahun 2024 sebesar 80 persen dan realisasi yaitu 66,67 persen.

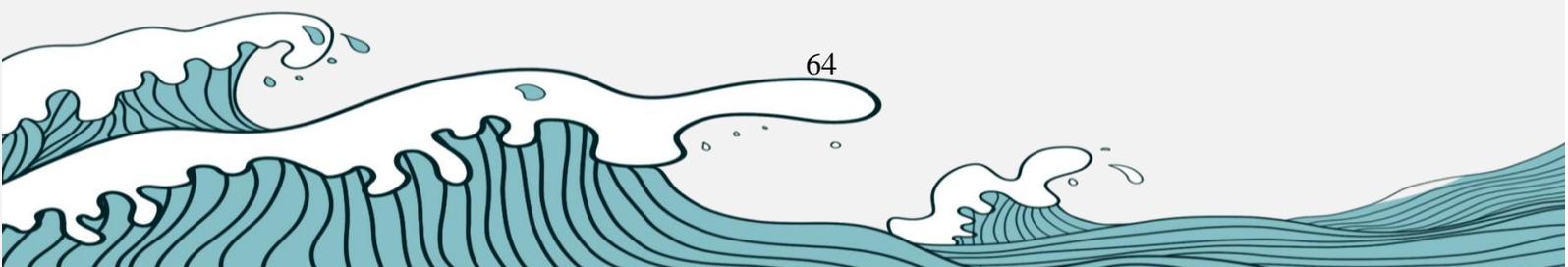
**b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**

Berdasarkan data tersebut, realisasi Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 karena hanya mencapai 69%.

**c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra**

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022). Hal ini disebabkan karena Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja baru terdapat di Perjanjian Kinerja mulai tahun 2023.

**d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional**



**Tabel 39. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
66,67	100	67

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 67%.

**e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

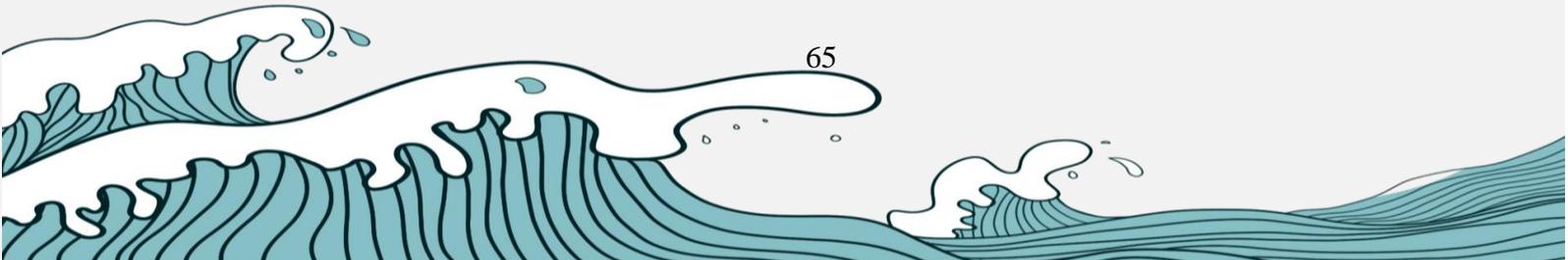
IKU ini dapat dilakukan apabila satker telah menindaklanjuti temuan yang telah dilakukan oleh ITJEN KKP dan melaksanakan saran yang telah diberikan. Aplikasi yang digunakan adalah Sidak KKP.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel**

**Tabel 40. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pengembangan	83,34%	17.720.000	4.126.000	14.767.405	10.641.405	60%	200%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 4.126.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 60%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Sidak sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.



**g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan ini berupa pelaksanaan pelaporan tindak lanjut terhadap temuan oleh ITJEN KKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

***IKU - 12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)***

Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%). Pengukuran Indikator dilakukan secara tahunan. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 94 dengan periode pengukuran tahunan.

**Tabel 41. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 12		Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
93	98,24	94	98,88	101	105	-	

**a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 93 dan realisasi tahun 2023 yaitu 98,24.

**b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**

Berdasarkan data tersebut, realisasi Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu mencapai 105%.

**c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra**

Berdasarkan data tersebut, IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena merupakan indikator baru pada tahun 2023

**d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional**

**Tabel 42. Perbandingan dengan Satker Lain**

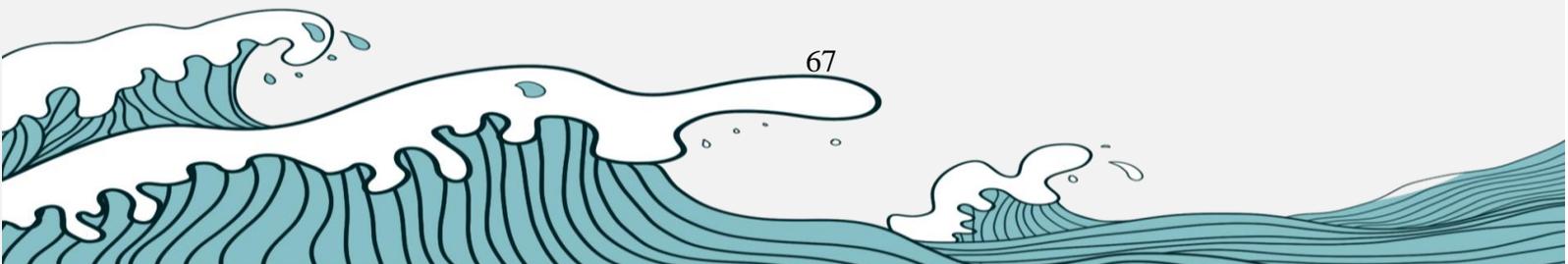
Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
98,88	98,63	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 100%.

**e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

Adanya pemenuhan dokumen SAKIP setiap bulan serta dilakukan pemantauan secara berkala dan monitoring dan evaluasi setiap triwulan. Pemantauan dilakukan melalui rapat Kepala Pelabuhan dan Tim Pengelola Kinerja.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel**



**Tabel 43. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	105,19%	68.280.000	61.587.381	71.824.749	10.237.368	15%	87%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 61.587.381,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 15%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Kinerjaku sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

**g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang kinerja yaitu Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan informasi kinerja pada unit kerja dalam pengelolaan kinerja dan penganggaran sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Mengintegrasikan aplikasi kinerjaku untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

***IKU- 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)***

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP



yang di ukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Realisasi IKU ini diukur dan dilaporkan berkala setiap bulan untuk ASN di setiap Subkor di PPN Pengembangan. IKU ini didukung oleh anggaran penyusunan administrasi perencanaan dan pengembangan SDM aparatur.

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.

**Tabel 44. Rincian Capaian Indikator**

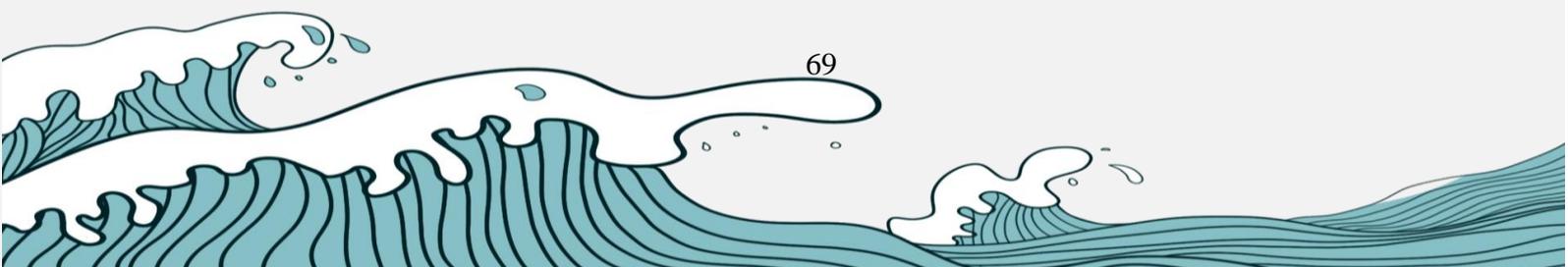
Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 13		Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
82	89,73	84	93,53	104	111	79	118

**a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2024 sebesar 84 dan realisasi nya yaitu 93,53 atau sebesar 111%.

**b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 104%. Realisasi tahun 2023 sebesar 93,53 sedangkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 89,73.



### c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2023 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 118 %.

### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

**Tabel 45. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
93,53	92,04	102

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 102%.

### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator kinerja ini pada tahun 2023 telah mencapai target yang berupa kualifikasi yaitu Pendidikan. Kemudian kompetensi berupa Diklat 20JP, Seminar dan Diklat Fungsional, Kemudian penilaian SKP dan hukuman disiplin.

### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

**Tabel 46. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	111,35%	12.088.560.000	6.932.368.144	13.460.035.914	6.527.667.770	54%	185%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 6.932.368.144,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 54%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian kepegawaian dan seluruh pegawai sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

**g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

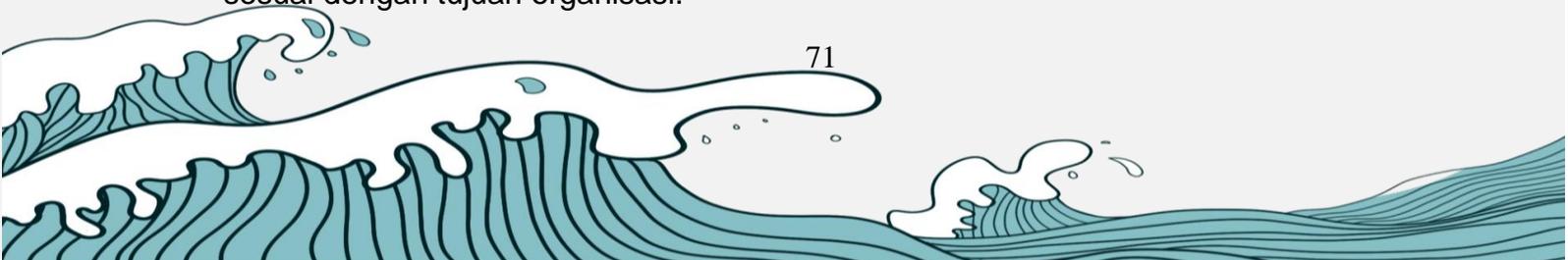
Pada tahun 2021 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ( ASN yang sudah ada dalam RKA-K/L yaitu kegiatan peningkatan, pengembangan dan pembinaan pegawai merupakan kegiatan yang menunjang kinerja.

Dalam penilaian kompetensi pejabat struktural lingkup UPT PPN Pengembangan, terdapat 12 komponen standar kompetensi yakni sebagai berikut :

(1) Integritas dengan kriteria : (a) Konsisten dan berpegang pada etika dan tata nilai organisasi yang berlaku, (b) Secara terbuka menyatakan pandangan tentang ketidak etisan meskipun hal itu akan merusak hubungan kerjanya, (c) Mengajak orang lain untuk membangun kepercayaan dan berkerja sesuai dengan etika organisasi yang berlaku, (d) Membangun pola cata kerja atau iklim kerja yang kondusif dengan memberikan suasana yang dapat menumbuhkembangkan saling percaya dan (e) Menjadi contoh bagi orang lain dalam bertindak/bekerja sesuai dengan nilai-nilai dan etika kerja.

(2) Kepemimpinan dengan kriteria : (a) Memberikan Penjelasan Kepada Tim Kerja, (b) Melakukan bimbingan kepada tim kerja, (c) Pendelegasian tugas dan wewenang, (d) Pengorganisasian sumber daya yang ada dan (e) Membangun situasi yang kondusif.

(3) Perencanaan pengorganisasian dengan kriteria : (a) Mengetahui jenis kegiatan berdasarkan kebutuhan organisasi, (b) Menentukan skala prioritas kegiatan kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan, (c) Memprediksi permasalahan dan menyusun tahapan penyelesaian masalah yang timbul, (d) Menggunakan penyelesaian secara sistimatis dalam menghadapi masalah dan membuat alternatif-alternatif untuk meningkatkan kinerja dan (e) Merumuskan tindakan jangka panjang sesuai dengan tujuan organisasi.



(4) Kerjasama, dengan kriteria : (a) Bersikap pasif dalam kelompok. Mendukung tujuan dan keputusan kelompok dengan cara menyelesaikan tugas secara bersama. Berpartisipasi dengan cara memberikan kontribusi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kelompok.

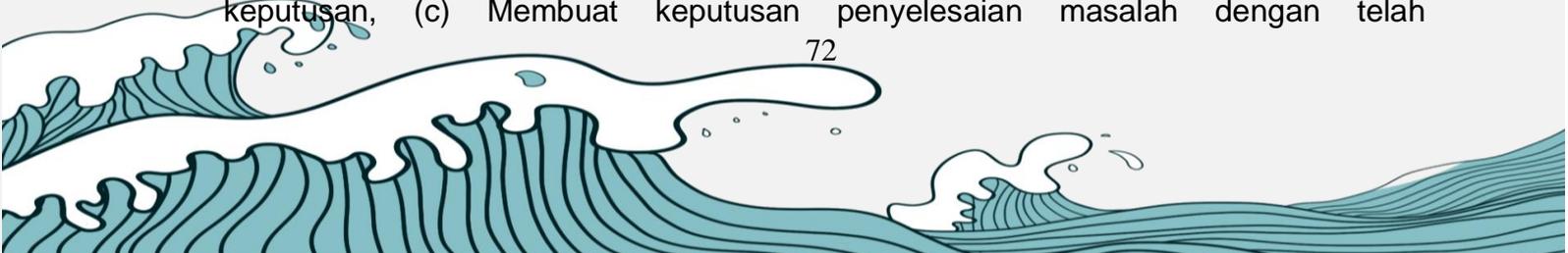
(5) Fleksibilitas berpikir, dengan kriteria : (a) Tidak mampu menerima pandangan dari orang lain. Mengikuti alur pemikiran pandangan dari orang lain Berupaya mendapatkan pandangan dari berbagai pihak dalam menghadapi perubahan situasi. Membantu rekan kerja/anggota tim yang mengalami kesulitan. Aktif memberikan semangat rekan/anggota tim untuk meningkatkan produktivitas kelompok.

(6) Berorientasi pada kualitas, dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, (b) Memperhatikan jalannya pelaksanaan tugas didukung dengan bahan yang benar, Mengamati prosedur kerja dengan cermat untuk mengantisipasi masalah yang timbul dan menetapkan standar kerja, (c) Membuat standar kerja baru untuk memperbaiki proses kerja agar efektif dan efisien. Mengawasi jalannya pekerjaan untuk menghindari kesalahan dengan membuat sistem pengawasan yang lebih efektif.

(7) Berorientasi pada pelayanan, dengan kriteria : (a) Memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku Memberikan pelayanan secara tepat dan tepat sesuai kebutuhan pelanggan, (b) Mengevaluasi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan pelayanan, (c) Mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memprediksi perubahan kebutuhan pelanggan. Mengembangkan metode baru dalam meningkatkan pelayanan.

(8) Manajemen Waktu dengan kriteria : (a) Melaksanakan pekerjaan yang sudah ada tanpa mempertimbangkan waktu yang disediakan, (b) Menyusun beberapa kegiatan yang akan dilakukan dengan menentukan batas waktu yang telah ditetapkan, (c) Memperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, (d) Menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan batasan waktu yang diperlukan dan (e) Menentukan prioritas pekerjaan disesuaikan dengan target waktu yang ada.

(9) Pengambilan keputusan dengan kriteria : (a) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, (b) Mengumpulkan informasi dan dukungan dari lingkungan dalam pengambilan keputusan, (c) Membuat keputusan penyelesaian masalah dengan telah



mempertimbangkan konsekuensinya, (d) Menetapkan keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak dan (e) Memastikan pelaksanaan keputusan dengan memantau hasil-hasil dan membuat penyesuaian- penyesuaian yang diperlukan.

(10) Pengaturan kerja dengan kriteria : (a) Mengenali tugas/pekerjaan yang lebih penting dan kurang penting, (b) Memastikan perlengkapan yang terkait dengan pekerjaan telah tersedia sesuai kebutuhan, (c) Menyusun alokasi dan penggunaan waktu yang efektif untuk penyelesaian pekerjaan, (d) Mengkoordinasi antara perencanaan kerja orang lain dan diri sendiri untuk menghindari masalah dan (e) Memanfaatkan berbagai sumber yang daya yang ada secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah.

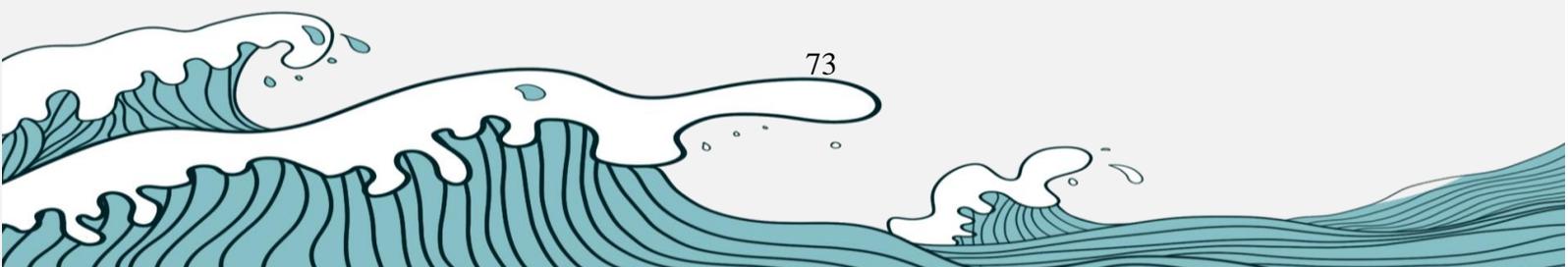
(11) Kepemimpinan strategis

(12) Membangun hubungan kerja strategis. Selain penilaian kompetensi juga ada penilaian terhadap tingkat kualifikasi pendidikan, kinerja serta disiplin yang artinya melihat pegawai apakah sudah pernah atau tidak pernah mendapat hukuman terkait kedisiplinan. Dari keempat komponen penilaian dihitung dengan membuat rata – rata yang menghasilkan indeks profesionalitas dari ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan.

#### ***IKU- 14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)***

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
- b. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
- c. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE
- d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- e. Laporan Penyelenggaraan PBJ
- f. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024



**Tabel 47. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 14		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
77,5	96,29	80	96,29	100	120	75	128

**a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 120%. Target tahun 2024 sebesar 80 persen dengan realisasi tahun sebesar 96,29 persen.

**b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**

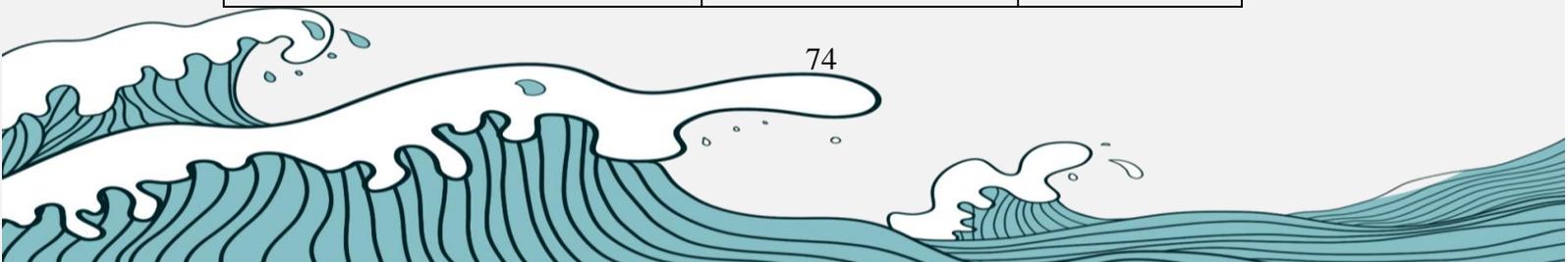
Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2024 sama dengan realisasi tahun 2023.

**c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra**

Berdasarkan data tersebut, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2022) mencapai 126%.

**d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional****Tabel 48. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
96,29	96,29	100



Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 100%.

#### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:

- a. Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- b. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa
- c. Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak) pengadaan barang dan jasa dengan kontrak/Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
- d. Menyelesaikan kontrak/surat perjanjian PBJ tepat waktu;
- e. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

**Tabel 49. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	120,36%	601.363.000	598.274.580	723.815.541	125.540.961	21%	105%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 598.274.580,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 21%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian pengadaan barang dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.



**g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan ini dapat ditunjang oleh penambahan SDM sebagai anggota Pokja sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja.

***IKU- 15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)***

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Itjen pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

**Tabel 50. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 15		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
77,5	87,5	80	90	103	113	75	120

### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 112,90%. Target tahun 2024 sebesar 80 persen dan realisasi tahun 2024 yaitu 90 persen.

### b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2024 lebih tinggi 113 % dari realisasi tahun 2023. Realisasi tahun 2024 sebesar

### c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2024) mencapai 109,37%.

### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

**Tabel 51. Perbandingan dengan Satker Lain**

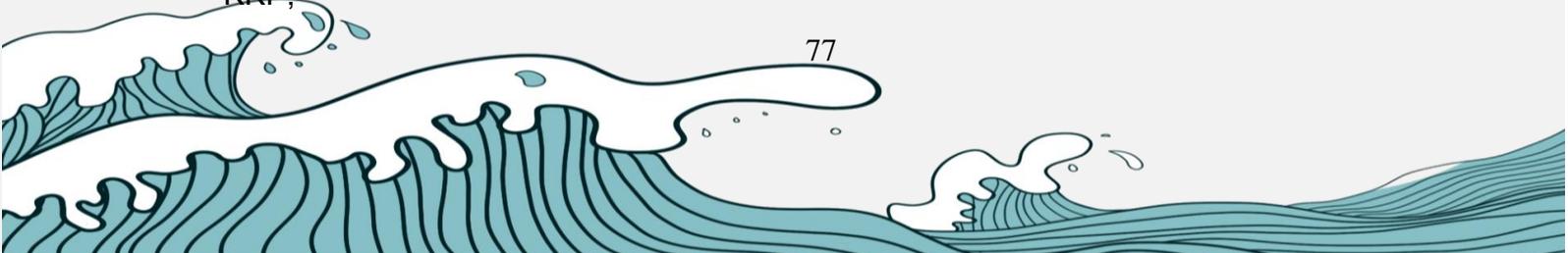
Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
90	90	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 92,10%.

### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator ini dapat tercapai apabila operator aktif menginput dan mengupdate data pada aplikasi SMART KEMENKEU. terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain:

- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;



- d. Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- e. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- f. Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel**

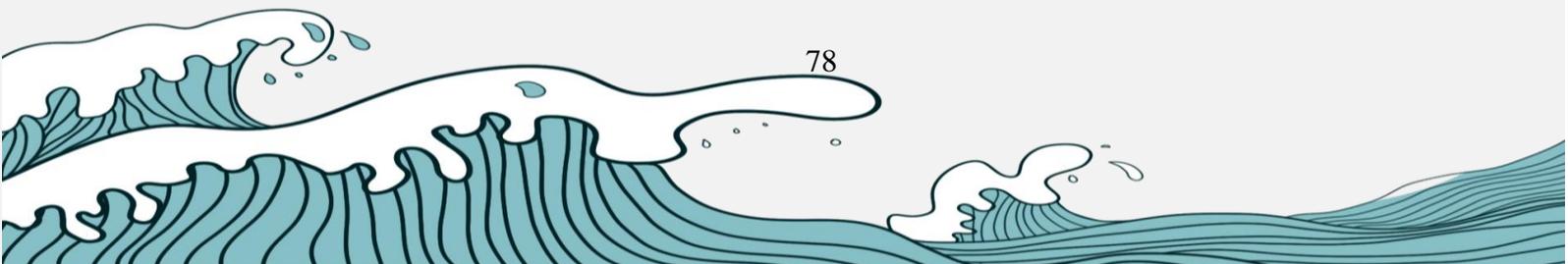
**Tabel 52. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	112,50%	2.160.000	2.160.000	2.430.000	270.000	13%	81%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 2.160.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 13%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian pengelola BMN dan persediaan dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

**g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan diantaranya adalah menambah pengelola Barang Milik Negara untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang asset milik negara serta melaksanakan pelaporan asset secara tepat dan akurat.



### ***IKU- 16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)***

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Satker dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap triwulannya dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada *dashboard* Om- SPAN Kementerian Keuangan.

**Tabel 53. Rincian Capaian Indikator**

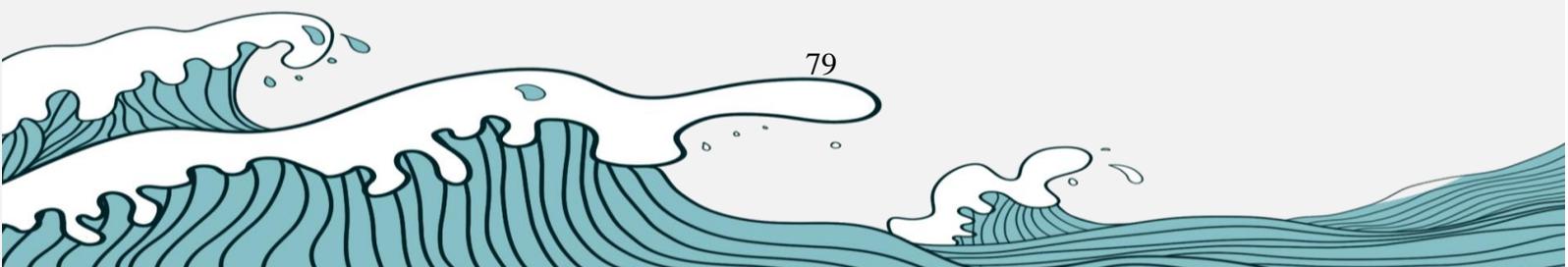
Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
93,75	96,4	93,76	96,66	100,2	103	89	109

#### **a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 103%. Target tahun 2024 sebesar 93,76 dan realisasi tahun 2023 yaitu 96,66.

#### **b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100,2%. Realisasi tahun 2024 sebesar 96,66 dan 2023 sebesar 96,4.



### c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target dalam renstra (2022) mencapai 109%.

### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

**Tabel 54. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
96,66	98,65	98

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 98 %.

### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Indikator kinerja pada tahun 2024 ditentukan oleh 7 (tujuh) indikator. Dari indikator tersebut, PPN Pengembangan mendapatkan nilai di atas target yang telah ditentukan terdiri dari Revisi DIPA dengan nilai 100, Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 88,86, Penyerapan Anggaran dengan nilai 96,17; Belanja Kontraktual dengan nilai 94, Penyelesaian Tagihan dengan nilai 100, Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 96,96, dan Capaian Output dengan nilai 100. Dari tujuh indikator yang dinilai, mendapatkan nilai 96,66 dan melebihi target tahun 2024 sebesar 93,76. Untuk mendapatkan nilai tersebut, terdapat beberapa proses yang dilakukan yaitu :

1. Meminimalkan revisi DIPA yang berkaitan dengan 14 jenis pagu tetap (maksimal dua kali dalam satu semester)
2. Deviasi Halaman III DIPA menyesuaikan antara perencanaan dan penarikan anggaran sehingga meminimalkan selisih nilai anggaran yang telah direncanakan dan digunakan.
3. Penyerapan anggaran memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai target program yang telah ditentukan minimal 95 persen
4. Melakukan pendaftaran belanja kontraktual sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPPN maksimal 15 hari kerja setelah tanda tangan perjanjian/kontrak
5. Penyelesaian tagihan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan



6. Pengelolaan UP dan TUP dengan cara meminimalkan pengembalian anggaran yang telah ditambahkan di uang persediaan.
7. terselesaikannya semua kegiatan yang telah direncanakan sehingga target progres dan output kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel**

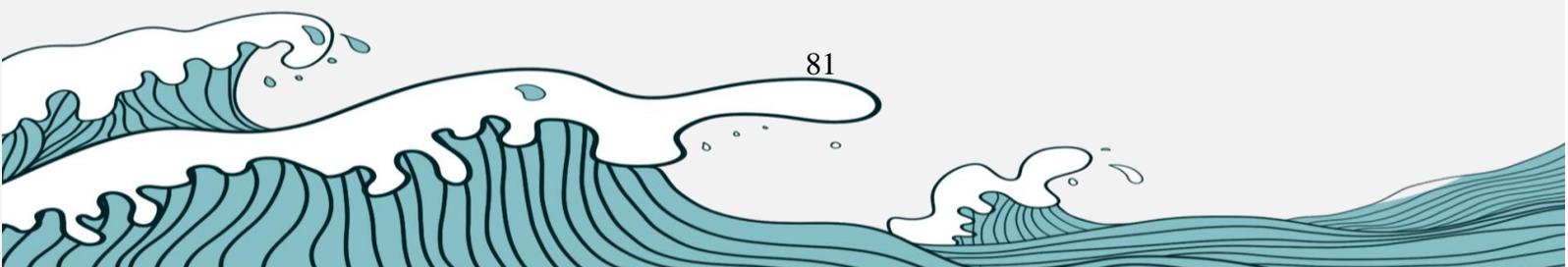
**Tabel 55. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	103,09%	138.368.000	103.093.520	142.647.727	39.554.207	29%	121%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 103.093.520,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 29%. SDM yang menunjang terlaksananya Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian perencanaan, keuangan dan operator Sakti dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

**g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pada tahun 2024 Nilai IKPA dapat tercapai apabila terdapat Kerjasama yang baik dan dukungan pimpinan untuk lebih intens dalam melakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat bulanan. Kegiatan tersebut berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan Ditjen Perikanan Tangkap dan merupakan kegiatan penunjang untuk tercapai IKU.



### ***IKU-17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)***

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

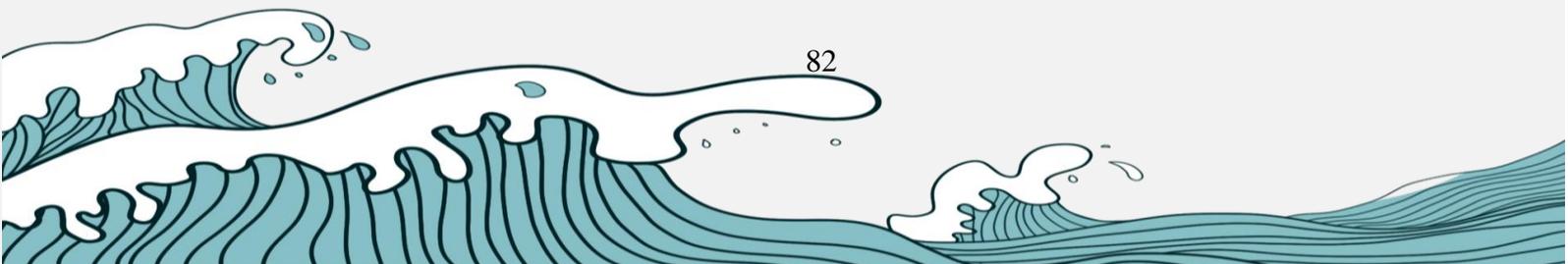
**Tabel 56. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	71	90	-	127	-	-

**a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 127%. Target tahun 2024 sebesar 71 dan realisasi yaitu 90.

**b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu**



Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru di Tahun 2024, sehingga belum bisa dibandingkan capaian nya dengan Tahun 2023.

**c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra**

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru di Tahun 2024, sehingga belum bisa dibandingkan dengan renstra.

**d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional**

**Tabel 57. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
90	90	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 100 %.

**e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan**

IKU ini dapat dilakukan apabila operator menginput data pada aplikasi SAKTI pada modul komitmen pada menu realisasi capaian output secara tepat waktu disetiap bulannya maksimal 5 hari kerja. Pengisian data berupa progress pelaksanaan kegiatan dan realisasi nya.

**f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel**

**Tabel 58. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	126,76%	32.492.000	29.049.883	41.187.042	12.137.159	37%	143%

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 29.049.883,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 37%. SDM yang menunjang terlaksananya Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Dukungan Manajerial bagian perencanaan, keuangan dan operator Sakti dan jasa sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

**g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melakukan reviu setiap minggu terkait kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan tersebut berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan Ditjen Perikanan Tangkap dan merupakan kegiatan penunjang untuk tercapai IKU.

***IKU-18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)***

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan.

**Tabel 59. Rincian Capaian Indikator**

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan					
Indikator Kinerja – 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)					
Tahun 2023		Tahun 2024		% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi 2023	Target 2024	Target Jangka Menengah	% Realisasi thd Target Renstra
88,21	89,08	88,30	89,76	101	102	-	-

### a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2024 sebesar 88,30 dan realisasi sebesar 89,76.

### b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, capaian Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 102%. Hal ini karena PPN Pengembangan berupaya untuk memperbaiki performa pelayanan agar pengguna jasa merasa lebih puas dari tahun sebelumnya.

### c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022). Hal ini disebabkan karena Nilai Survei Kepuasan Masyarakat baru terdapat di Perjanjian Kinerja mulai tahun 2023.

### d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

**Tabel 60. Perbandingan dengan Satker Lain**

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
89,76	93,22	96

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 96%. Faktor yang mempengaruhi adalah belum optimalnya pelaksanaan PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap) di PPN Pengembangan, dan jumlah petugas pelayanan yang masih terbatas.

### e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan



kebutuhan. Survei Kepuasan Masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang meningkatkan kualitas pelayanannya. Hasil dari SKM digambarkan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), melalui IKM tersebut dapat diketahui kategori pelayanan pada unit kerja tersebut. Salah satu cara agar nilai IKM optimal yaitu dengan melakukan perbaikan pelayanan secara berkala dan mempertimbangkan masukan, saran, maupun kritik dari pengguna jasa.

#### f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

**Tabel 61. Realisasi anggaran mendukung IKU**

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)		
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Pengembangan	101,65%	25.573.000	24.922.690	25.995.838	1.073.148	4%	60%

Pada Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 24.922.690,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 4%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Si Susan sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

#### g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pelayanan publik agar nilai SKM tinggi yaitu dilaksanakan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait standar pelayanan serta rutin dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap tahunnya. Melalui kegiatan FKP tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mendapatkan beberapa masukan terkait pelayanan publik yang telah berjalan, dan sebagai evaluasi perbaikan pada periode penilaian berikutnya. Dengan adanya



evaluasi tersebut diharapkan pelayanan publik di PPN Pengembangan jauh lebih baik, sehingga nilai/tingkat kepuasan masyarakat dapat tinggi juga.

## B. Akuntabilitas Keuangan

Pada 2024 ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp 16.443.659.000,- yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

**Tabel 29. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2024**

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TAHUN 2024	
			TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.517.716.000	3.517.716.000	100%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	38.000.000	100%
2337.ACA	Perizinan Produk[Base Line]	24.900.000	24.900.000	100%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	24.900.000	24.900.000	100%
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	13.100.000	13.100.000	100%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.100.000	13.100.000	100%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.388.402.000	3.388.402.000	100%
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	150.000.000	150.000.000	100%
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	150.000.000	150.000.000	100%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	1.750.402.000	1.750.402.000	100%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.750.402.000	1.750.402.000	100%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	75.000.000	75.000.000	100%
2338.RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan	75.000.000	75.000.000	100%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.413.000.000	1.413.000.000	100%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	413.000.000	413.000.000	100%

2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenyelayan	8.000.000	8.000.000	100%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	8.000.000	8.000.000	100%
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	8.000.000	100%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	83.314.000	83.314.000	100%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	83.314.000	83.314.000	100%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	83.314.000	83.314.000	100%
<b>032.03.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>12.925.943.000</b>	<b>12.925.943.000</b>	<b>100%</b>
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.925.943.000	12.925.943.000	100%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	255.108.000	255.108.000	100%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	255.108.000	255.108.000	100%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	12.105.440.000	12.105.440.000	100%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	38.273.000	38.273.000	100%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	13.727.000	13.727.000	100%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.053.440.000	12.053.440.000	100%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	271.255.000	271.255.000	100%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	271.255.000	271.255.000	100%
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	55.000.000	55.000.000	100%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	55.000.000	55.000.000	100%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	239.140.000	239.140.000	100%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	68.280.000	68.280.000	100%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	32.492.000	32.492.000	100%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	138.368.000	138.368.000	100%

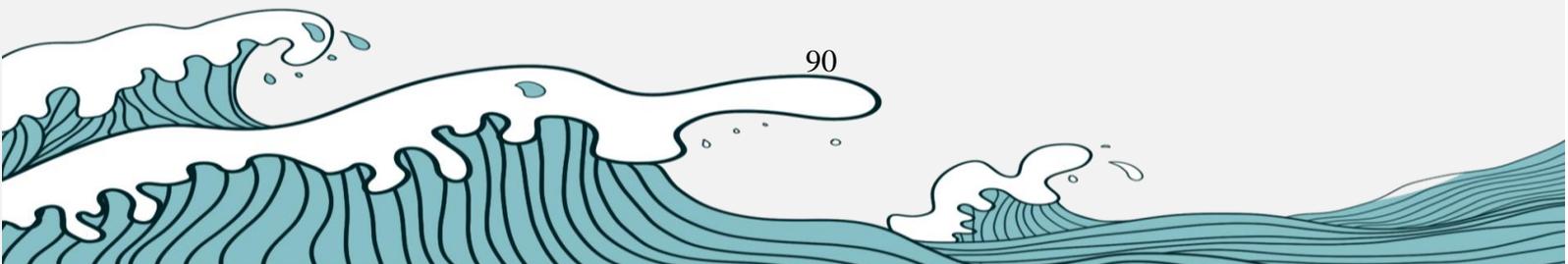
Dari pagu anggaran tersebut di atas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sampai dengan Tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program kegiatannya telah terealisasi sebesar Rp 15.709.597,130 atau 95,54% dari total anggaran

**Tabel 62. Realisasi Keuangan PPN Pengembangan s/d Tahun 2024**

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI TAHUN 2024		
			REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.517.716.000	3.223.798.968	91,64%	91,64%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	35.335.653	92,99%	92,99%

2337.ACA	Perizinan Produk[Base Line]	24.900.000	24.875.653	99,90%	99,90%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	24.900.000	24.875.653	99,90%	99,90%
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	13.100.000	10.460.000	79,85%	79,85%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.100.000	10.460.000	79,85%	79,85%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.388.402.000	3.155.540.879	93,13%	93,13%
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	150.000.000	143.185.012	95,46%	95,46%
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	150.000.000	143.185.012	95,46%	95,46%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	1.750.402.000	1.587.441.342	90,69%	90,69%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.750.402.000	1.587.441.342	90,69%	90,69%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	75.000.000	74.998.920	100,00%	100,00%
2338.RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan	75.000.000	74.998.920	100,00%	100,00%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.413.000.000	1.349.915.605	95,54%	95,54%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1.000.000.000	995.827.026	99,58%	99,58%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	413.000.000	354.088.579	85,74%	85,74%
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	7.854.500	98,18%	98,18%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	8.000.000	7.854.500	98,18%	98,18%
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	7.854.500	98,18%	98,18%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	83.314.000	25.067.936	30,09%	30,09%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	83.314.000	25.067.936	30,09%	30,09%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	83.314.000	25.067.936	30,09%	30,09%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	12.925.943.000	12.486.266.262	96,60%	96,60%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	12.925.943.000	12.486.266.262	96,60%	96,60%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	255.108.000	254.900.000	99,92%	99,92%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	255.108.000	254.900.000	99,92%	99,92%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	12.105.440.000	11.728.428.237	96,89%	96,89%

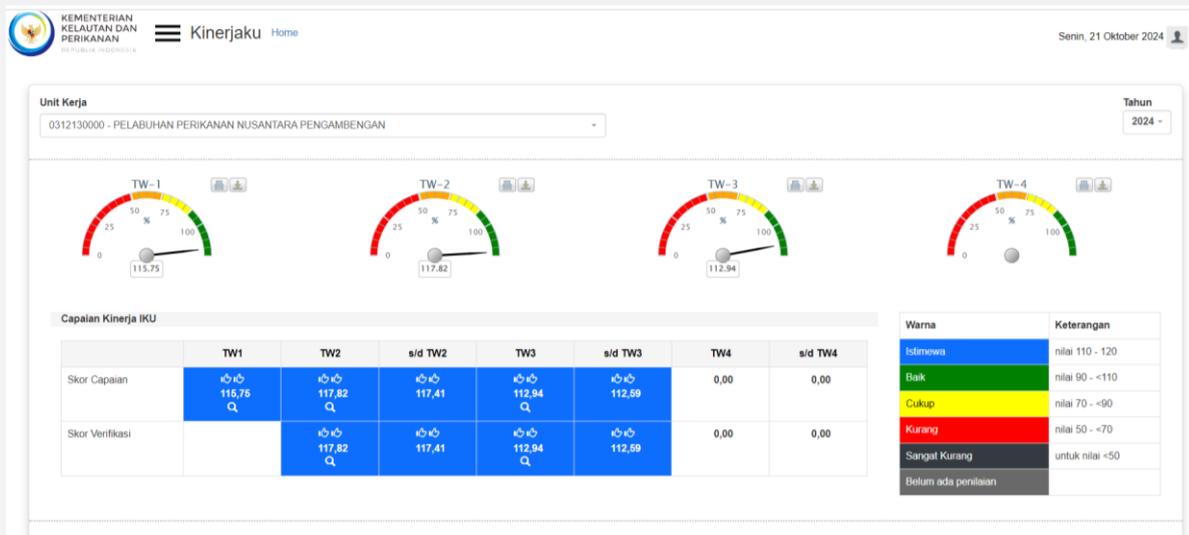
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	38.273.000	29.422.690	76,88%	76,88%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	13.727.000	6.602.299	48,10%	48,10%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.053.440.000	11.692.403.248	97,00%	97,00%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	271.255.000	268.375.660	98,94%	98,94%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	271.255.000	268.375.660	98,94%	98,94%
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	55.000.000	40.831.581	74,24%	74,24%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	55.000.000	40.831.581	74,24%	74,24%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	239.140.000	193.730.784	81,01%	81,01%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	68.280.000	61.587.381	90,20%	90,20%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	32.492.000	29.049.883	89,41%	89,41%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	138.368.000	103.093.520	74,51%	74,51%



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp 16.443.659.000,- pada Tahun 2024, yang terealisasi sebesar Rp 15.709.597,130 atau 95,54 % dari total target penyerapan anggaran pada Tahun 2024. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **116,58%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi KinerjaJaku pada Gambar 1)



**Gambar 3. Dashboard pada aplikasi KinerjaJaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024**

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan s/d Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.01.01 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)
2. IKS.02.02 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
3. IKS.03.01 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
4. IKS.03.02 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
5. IKS.03.03 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
6. IKS.04.01 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
7. IKS.04.02 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
8. IKS.05.01 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
9. IKS.06.01 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IKS.07.01 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
12. IKS.07.03 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
13. IKS.07.04 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)
14. IKS.07.05 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
15. IKS.07.06 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
16. IKS.07.07 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
17. IKS.07.08 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
18. IKS.07.09 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)



Sedangkan untuk indikator yang tidak memenuhi target pada Tahun 2024, antara lain :

11. IKS.07.02 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara pengembangan, terdapat kendala dan permasalahan, adapun permasalahan yang dialami adalah :

1. Terdapat kerusakan pada dermaga utama lingkungan PPN Pengembangan
2. Adanya kebocoran atap di Gedung *cold storage*
3. Terhambatnya pelayanan kepada nelayan disebabkan peralihan kewenangan penerbitan SCPIB dari DJPT ke BP2MHKP
4. Beberapa awak kapal perikanan belum memiliki sertifikasi yang sesuai jabatan atau tugasnya di atas kapal perikanan

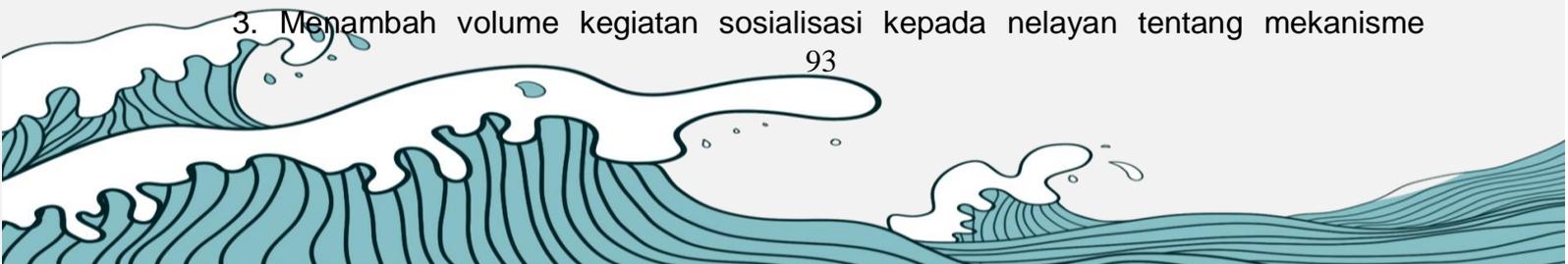
#### **B. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya**

1. Telah dilakukan penambahan fasilitas kanopi di kios pasar pada tanggal 21 November 2024
2. Telah dilakukan pergantian penyedia jasa layanan internet di kantor PPN Pengembangan pada tanggal 4 Desember 2024
3. Telah dilakukan pengadaan AC dan dispenser di Balai Pertemuan Nelayan dan Ruang Pelayanan.
4. Telah diadakan sosialisasi langsung kepada nelayan terkait kesesuaian dokumen kapal kondisi mesin aktual pada kapal slerek oleh pegawai PPN Pengembangan

#### **C. Rekomendasi Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab II di atas, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan pada dermaga utama lingkungan PPN Pengembangan.
2. Melakukan perbaikan kebocoran atap di Gedung *cold storage*
3. Menambah volume kegiatan sosialisasi kepada nelayan tentang mekanisme



pelayanan SCPIB yang baru.

4. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada nelayan atau pemilik kapal, sehingga sebagian besar awak kapal terutama nakhoda sudah memiliki sertifikat SKK

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Tahun 2024 ini disampaikan sebagai tolak ukur kinerja pelabuhan dan bahan kajian evaluasi serta koreksi dalam rangka pembangunan dan pengembangan unit kerja di masa yang akan datang.

